

LKJIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN TAKALAR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BUPATI TAKALAR

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar dapat disusun tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun sebagai komitmen pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bersih, terbuka, akuntabel serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jabatan Penjabat Bupati Takalar terdahulu telah berakhir pada tanggal 19 Februari 2025 dan kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja telah kami laksanakan sebagai wujud pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas perjanjian kinerja dan pencapaian sasarannya serta keterkaitannya dengan penggunaan anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar ini dapat

memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju ke pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada tahap berikutnya.

Sebagai Bupati Takalar terpilih tahun 2025 – 2030, saya mengucapkan terimas kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kinerja ini. Kritik, saran dan rekomendasi yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak dalam mewujudkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Bupati Kab. Takalar

Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI III

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Gambaran Umum Daerah 3

D. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 25

BAB II. PERENCANAAN KINERJA **29**

A. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 29

B. Perjanjian Kinerja..... 37

C. Rencana Anggaran Tahun 2024 44

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA **45**

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024..... 45

B. Analisis Capaian Kinerja..... 49

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 73

D. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja 73

BAB IV PENUTUP..... 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkanmelalui alat pertanggung jawaban secara berkala.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabiltas kinerja yang utuh yang dibuat dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja merupakan rangkuman penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu satu tahun berupa bentuk pertanggung jawaban atas keseluruhan proses kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini dilandaskan suatu niat yang tulus untuk mewujudkan *Good Governance*, yakni suatu tatanan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. *Good Governance* sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh tingkat akuntabiltas pelaporan pada semua tingkatan organisasi. Terdapat beberapa masalah sering muncul dalam upaya mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah delegasi wewenang yang tidak jelas, indikator kinerja yang tidak terukur atau tidak sesuai dengan rencana strategis, terlalu banyaknya tujuan organisasi uang akan dicapai dan kadangkala tidak konsisten, perundang undangan yang tidak ada

hubungannya secara langsung dengan tujuan organisasi, serta tidak adanya pemisah yang jelas antara kesuksesan dan kegagalan.

Proses penyusunan LKJ Kabupaten Takalar dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator, serta rencana dan realisasi kegiatan. Selanjutnya menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan realisasi dan target. Langkah akhir dari proses penysunan LKJ adalah melakukan analisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing – masing capaian indikator kinerja yang telah diukur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) memiliki dua fungsi utama yaitu: Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2024 dan kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Takalar adalah sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan pertangung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar selain sebagai upaya perbaikan berkesinambungan baik instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, LKj diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Takalar untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat diseluruh KabupatenTakalar;
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Takalar yang akuntabel, sehingga berperan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan

yang tentram, tertib dan kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang lebih baik kepada
   masyarakat;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Takalar.

Proses penyusunan LKj Kabupaten Takalar dilakukan melaluitahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan. Selanjutnya, menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan realisasi dan target. Langkah akhir dari proses penyusunan LKj adalah melakukan analisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing-masing capaian indikator kinerja yang diukur.

C. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1. Letak Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Di dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) seluruh wilayah Kabupaten Takalar masuk dalam KSN Perkotaan Mamminasata bersamaan dengan kawasan perkotaan Maros, Kota Makassar, perkotaan Sungguminasa dan perkotaan Takalar (ibukota kabupaten Pattalassang).

Gambar I.1.
Peta Administrasi Kabupaten Takalar



Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara 5°30' – 5°38' Lintang Selatan dan 119°22' – 119°39' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Takalar memiliki batas – batas: di sebelah timur, berbatasan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.

Kabupaten Takalar terdiri dari 110 desa/kelurahan yang terletak di 10 kecamatan. Menurut letak geografinya, sebanyak 39 desa/ kelurahan berada pada kawasan tepi laut sedangkan 71 desa/kelurahan merupakan wilayah bukan tepi laut. Menurut letak topografinya sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar adalah dataran, namun terdapat 4 desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah lereng/puncak yaitu 2 desa di Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara. Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat

566,51 km^2. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel II-1.

Tabel I.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kel		
1.	Mangarabombang	11	1	100,50	17,74
2.	Mappakasunggu	3	1	15,12	2,67
3.	Sanrobone	6	-	29,46	5,18
4.	Polongbangkeng Selatan	5	6	88,07	15,54
5.	Pattallassang	-	9	25,31	4,47
6.	Polongbangkeng Utara	12	6	212,25	37,47
7.	Galesong Selatan	13	-	24,71	4,36
8.	Galesong	17	-	25,93	4,58
9.	Galesong Utara	13	1	15,11	2,67
10.	Kepulauan Tanakeke	6	-	30,15	5,32
Jumlah		86	24	566,51	100,0

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel II-1 juga dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan luas wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara yaitu seluas 212,25 Km2 atau 37,47% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Takalar, sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu masing-masing Kecamatan Galesong Utara yaitu seluas 15,11 Km2 (2,67%) dan Kecamatan Mappakasunggu yaitu seluas 15,12 Km2 (2,67%) dari total luas wilayah Kabupaten Takalar.

1.2. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 0 – 1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 mdpl.

Tabel I.2.
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kacamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2024

No.	Kecamatan	Tinggi (meter)
1.	Mangarabombang	34
2.	Mappakasunggu	44
3.	Sanrobone	22
4.	Polongbangkeng Selatan	64
5.	Pattallassang	38
6.	Polongbangkeng Utara	41
7.	Galesong Selatan	22
8.	Galesong	32
9.	Galesong Utara	17
10.	Kepulauan Tanakeke	19

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2025

1.3. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh formasi camba, terobosan, gunung api cindako, formasi tonasa dan endapan aluvium. Masing masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain :

1. Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal
2. Formasi Camba terbentuk atas sendimen laut berselingan
3. Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping
4. Formasi Gunung Api–Cindako, terbentuk atas batuan lava- breksi-tufa-konglomerat dan terutama lava
5. Endapan alivium dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, dan lumpur.

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari; Vulcanic (batuan Vulkanik), batuan ini merupakan batuan tertua yang telahmengalami perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape – Cindako merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan piroklastik yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di wilayah pegunungan dan daerah dataran, Lapisan batuan ini memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Batuan Instrusif terdiri atas

batuan basal mulai dari dolerit, diorit, gabbro hingga diabase.

1.4. Hidrologi

Secara Hidrologi, Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Je'neberang, Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Je'netallasa, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung. 4 (empat) diantara 6 (enam) sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha, yaitu Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung.

1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan draft peraturan daerah Kabupaten Takalar tentang RTRW Kabupaten Takalar tahun 2020-2041, pola ruang kawasan budi daya direncanakan sesuai kemampuan lahan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. Pemanfaatan kawasan budi daya juga diarahkan dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah. Pengembangan kawasan budi daya di Kabupaten Takalar dilakukan secara efektif dan efisien serta sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budi daya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tabel I.5.
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Takalar

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 2.856 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara.
2	Kawasan Pertanian	Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 26.266 (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam) hektar berada di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan tanaman pangan terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 18.457 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan
		Polongbangkeng Utara, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Sanrobone.
		Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) hektar berada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Polongbangkeng Utara

3	Kawasan Perikanan	Kawasan perikanan dengan luas kurang lebih 4.186 (empat ribu seratus delapan puluh enam) hektar berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Sanrobone.
4	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu)hektar berada di Kecamatan Mangarabombang.
5	Kawasan Pariwisata	Kawasan pariwisata berada di Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone.
6	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.112 (lima ribu seratus dua belas) terdapat di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone.

		Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) terdapat di seluruh wilayah kecamatan
7	Kawasan Transportasi	Kawasan transportasi seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Galesong
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2021-2041

1.6. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Takalar terletak di kaki Pulau Sulawesi dimana 40% wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sepanjang 74 km. Kondisi topografis Kabupaten Takalar yang terdiri atas dataran rendah, perbukitan dan pesisir pantai, selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki po tensi rawan bencana khususnya banjir dan angin puting beliung. Semua kondisi tersebut akan menimbulkan risiko dan dampak kerawanan bencana baik banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung (cuaca ekstrim), gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Takalar perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana guna meminimalisir dampak dari bencana-bencana yang berpotensi terjadi.

Tabel I.6.
Kejadian Bencana di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2024

No	Jenis Bencana	Lokasi	Luas Wilayah Terdampak	Waktu Kejadian
2019				
1	Banjir	7 kecamatan	800 Ha	januari
2	Puting Beliung	Polongbangkeng utara dan Mangarabombang	41 Rumah	Januari,maret dan november
2020				
1	Puting Beliung	Galesong utara	15 Rumah	Januari, Februari, Novemberdan Desember
3	Gelombang Pasang/ Abrasi	Sampulungan Galesong Utara	1 Rumah	Desember
1	Banjir			,
2	Puting Beliung	Galesong	9 rumah	januari
3	Gelombang pasang/abrasi	*	*	*
4	kekeringan	*	*	*
2022				
1.	Angin putting beliung	Kepulauantanakeke	38 rumah	juni
2023				
1.	Puting beliung	Desa popo,kec galesong selatan	3 rumah	Februari
2.	Banjir	Pammukkulu kec.polongbangkeng utara	3 orang meninggal	Maret
3.	kekeringan	Lengkese, Kec.mangarabombang	50 kk terdampak	oktober
2024				
1	Puting Beliung	Kec. Mangarabombang, Sanrobone, Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong, Mappakasunggu, Polongbangkeng Selatan, Pattallassang	129 KK terdampak	Januari - Desember 2024
2	Banjir	Kec. Galesong Selatan, Polongbangkeng Selatan, Pattallassang dan Sanrobone	138 KK terdampak	Januari - Desember 2024

3	Kebakaran	Kec. Polongbangkeng Selatan, Pattallassang, Polongbangkeng Utara, Galesong Utara, Sanrobone, Galesong Selatan	16 KK terdampak	Januari - Desember 2024
4	Tenggelam	Kec. Mangarabombang, Galesong Selatan, Galesong,	5 orang tidak ditemukan, 2 meninggal	Januari - Desember 2024

Sumber : website data informasi bencana dari BNPB Kab.Takalar

Data dan Informasi dari BNPD mencatat bahwa Kabupaten Takalar pernah mengalami kejadian bencana seperti banjir, angin puting beliung, Gelombang Pasang/ Abrasi, Kekeringan, Kebakaran bahkan tenggelam. Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan jumlah pengungsi yang terbanyak ada pada bencana banjir. Data dari BNPB menunjukkan kejadian yang sudah pernah terjadi di Kabupaten Takalar dan tidak menutup kemungkinan Kabupaten Takalar masih menyimpan potensi bencana yang lain. Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Takalar adalah kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana abrasi pantai sampulungan kecamatan Galesong Utara. Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis pasca bencana. Menyikapi tingginya potensi risiko bencana, Kabupaten Takalar membutuhkan sebuah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Optimalitas perencanaan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, serta pengintegrasian RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar. Proses ini diperlukan agar dapat memastikan RPB yang telah dibuat menjadi bagian dari rencana induk pembangunan Kabupaten Takalar secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya penanggulangan bencana, meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi terkait Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten

Takalar, serta membangun dasar yang kuat untuk penyelenggaraan PB.

Analisis bahaya bencana disusun berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Takalar dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pendekatan ini menghasilkan tingkat/kelas bahaya bencana di setiap potensi bencana yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial. Kajian bahaya suatu kawasan diperoleh berdasarkan analisis indeks bahaya untuk setiap potensi bencana. Indeks bahaya yang merupakan dasar penentuan kategori kelas bahaya diperoleh dari parameter- parameter penentu bahaya dengan melalui proses tumpang susun (overlay) menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi geografi). Analisis tumpang susun menggunakan metode berbobot tertimbang yaitu Scoring. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di kawasan tersebut. Dari potensi bencana yang ada, maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di kawasan tersebut.

Kajian bahaya di Kabupaten Takalar terdiri dari 4 jenis bencana yaitu banjir, angin puting beliung, gelombang ekstrim dan abrasi,dan kekeringan. Pengkajian bahaya yang dilakukan untuk seluruh potensi bencana berpedoman pada metodologi bahaya untuk memperoleh kelas bahaya dan peta bahaya yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kelas bahaya yaitu:

- Rendah (0 - 0,333);
- Sedang (0,333 - 0,666); dan
- Tinggi (0,666 - 1).

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Metode kajian bahaya banjir yang

digunakan adalah metode GFI (Geomorphic Flood Index) yang merupakan pendekatan untuk melihat wilayah rawan dan potensi banjir berdasarkan parameter geomorfologi di wilayah tersebut. Peta yang dihasilkan akan menggambarkan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam periode waktu yang lama. Adapun luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel I.7.
Bahaya Bencana Banjir Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	3.410.38	4.607.78	1.272.64	9.290.80
2.	Mappakasunggu	24.73	652.18	251.40	928.31
3.	Sanrobone	227.64	1.204.51	222.89	1.655.03
4.	Polongbangkeng Selatan	2546.74	4.409.52	637.48	7.593.74
5.	Pattallassang	375.16	2.027.91	282.71	2.685.77
6.	Polongbangkeng Utara	6.446.43	5.539.37	642.44	1.2628.24
7.	Galesong Selatan	430.46	1.532.29	227.37	2.190,12
8.	Galesong	299,26	1.627.45	231.25	2.157,96
9.	Galesong Utara	619.43	1.070.27	105.32	1.795.02
10	Kepulauan Tanakeke	1.114.34	2.192.23	490.98	3.797.56
Total		15.494.58	24.863.51	43.64.47	44.722.55
Persentase (%)		34.65	55.60	9.76	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebesar 44.722,55 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 24.863,51 Ha atau 55,60 persen. Sedangkan bahaya bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi sebesar 4.364,47Ha atau 9,76%.

Bencana banjir merupakan ancaman bagi penduduk beserta aktivitasnya sehingga perlunya Pemerintah Kabupaten Takalar menyiapkan penanggulangan bencana banjir yang dapat dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan saat banjir (response/intervention), dan pemulihan setelah banjir (recovery). Tiga Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang berkesinambungan. Pemetaan terhadap bencana banjir juga sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana.

1.2.1. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba- tiba dengan volume air yang besar selama periode waktu yang singkat. Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang mempunyai alur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Pemetaan banjir bandang ini dilakukan dengan melihat alur sungai yang berpotensi tersumbat oleh longsor di hulu sungai. Adapun luasan bahaya bencana banjir bandang diKabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.8.
Bahaya Bencana Banjir Bandang Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Pattallassang	14.36	61.91	120.21	196.48
2.	Polongbangkeng Selatan	54.92	280.99	756.07	1091.98
3.	Polongbangkeng Utara	194.85	575.10	906.98	1676.93
Total		264.13	918.00	1.783.26	2.965.39
Persentase (%)		8.91	30.96	60.14	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

1.2.2. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, cuaca ekstrim atau angin puting beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Sedangkan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: Kep. 009 Tahun 2010 disebutkan, angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan cummulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 knots atau 64,4 km/jam dan terjadi dalam waktu yang singkat. Angin puting beliung merupakan fenomena atmosfer dapat terjadi ketika faktor- faktor pembentuknya terpenuhi seperti adanya wilayah tekanan udara rendah yang dikelilingi oleh daerah bertekanan udara tinggi sehingga terbentuk siklon. Adapun luasan bahaya bencana cuaca ekstrim di

Kabupaten Takalarsebagai berikut:

Tabel I.9.
Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.302.16	9.302.16
2.	Mappakasunggu	918.02	918.02
3.	Sanrobone	1.643.14	1.643.14
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	21.973.31	21.973.31
7.	Galesong Selatan	2.220.02	2.220.02
8.	Galesong	2.187.85	2.187.85
9.	Galesong Utara	1.834.52	1.834.52
10	Kepulauan Tanakeke	4.120.07	4.120.07
	Total (Ha)	55.549.21	55.549.21

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

1.2.3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.10.
Bahaya Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Perkecamatandi Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya		Total (Ha)
		Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	528.70	183.06	711.76
2.	Mappakasunggu	79.66		79.66
3.	Sanrobone	99.15		99.15
4.	Galesong Selatan	146.05		146.05
5.	Galesong	107.35		107.35
6.	Galesong Utara	286.40		286.40
7.	Kepulauan Tanakeke	258.51	143.33	401.84
Total (Ha)		1.505.82	326.39	1.832.21
Presentase (%)		82.18	17.81	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Takalar sebesar 1.832,21 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 1.505,82 Ha atau 8 2 , 1 8 persen. Sedangkan untuk kelas bahaya tinggi dengan luas 326,39 Ha atau 17,81 persen.

1.2.4. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel I.1.
Bahaya Bencana Gempa Bumi Per kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.373.93	9.373.93
2.	Mappakasunggu	928.81	928.81
3.	Sanrobone	1.652.49	1.652.49
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	2.1973.32	2.1973.32
7.	Galesong Selatan	2.220.31	2.220.31
8.	Galesong	2.189.34	2.189.34
9.	Galesong Utara	1.840.40	1.840.40

10	Kepulauan Tanakeke	4.226.34	4.226.34
Total (Ha)		55.755.05	55.755.05

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Takalar sebesar 55.755,05 Ha dengan kelas bahaya sedang.

1.2.5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.12.
Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Tinggi	Total (Ha)
1.	Polongbangkeng Selatan	81.34	81.34
2.	Polongbangkeng Utara	4.260.97	4.260.97
Total (Ha)		4.342.31	4.342.31

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Takalar sebesar 4.342,31 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

1.2.6. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatann ekonomi dan lingkungan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi

awal dalam terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisa untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun luasan bahaya bencana kekeringan di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.13.

Bahaya Bencana Kekeringan Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.425.26	9.425.26
2.	Mappakasunggu	938.24	938.24
3.	Sanrobone	1.666.08	1.666.08
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	2.1973.32	2.1973.32
7.	Galesong Selatan	2.220.31	2.220.31
8.	Galesong	2.220.31	2.220.31
9.	Galesong Utara	1.840.40	1.840.40
10	Kepulauan Tanakeke	4.225.44	4.225.44
Total (Ha)		55.825.39	55.825.39

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

1.2.7. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilantanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Peta zona gerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah rawan longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Adapun luasan bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.14.

Bahaya Bencana Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Polongbangkeng Selatan	6.97	186.13	3.34	196.44
2.	Polongbangkeng Utara	76.66	4.263.16	1.962.84	6.302.66
Total (Ha)		83.62	4.449.29	1.966.18	6.499.10
Presentase (%)		1.29	68.46	30.25	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Takalar sebesar 6.449,10 Ha dandidominasi kelas bahaya sedang dengan luas 4.449.29 Ha atau 6 8 , 4 6 persen. Sedangkan untuk kelas bahaya tinggi dengan luas 1.966,18 Ha atau 3 0 , 2 5 persen.

1.2.8. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempabumi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana tsunami di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.15.
Bahaya Bencana Tsunami Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Ringan	Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	621.56	455.61	2.320.52	3.397.69
2.	Mappakasunggu	38.63	36.38	799.03	874.04
3.	Sanrobone	208.26	130.35	929.65	1.268.26
4.	Polongbangkeng Selatan	3.86			3.86
5.	Pattallassang	74.76	13.32	18.79	106.87
6.	Polongbangkeng Utara				
7.	Galesong Selatan	219.80	111.99	260.38	592.17
8.	Galesong	65.68	35.15	126.32	227.15
9.	Galesong Utara	222.44	143.43	298.05	663.92
10	KepulauanTanakeke	1.348.87	423.95	767.82	2.540.64
Total (Ha)		2.803.86	1.350.18	5.520.57	9.674.61
Presentase (%)		28.98	13.96	57.06	100

Sumber :Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 9 Kecamatan di Kabupaten Takalar yang berpotensi terdampak bahaya bencana tsunami dengan luasan sebesar 9.674,61 Ha dandidominasi kelas bahaya tinggi dengan luas 5.520,57 Ha atau 57,06 persen.

1.2.9. Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Takalarterlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.. Berdasarkan Kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke dengan nilai laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,29% per tahun dan terendah terjadi pada wilayah Kecamatan Pattallassang yaitu sebesar 1,58%

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun 2020- 2024 (%)
1	Mangarabombang	45.615	2.59
2	Mappakasunggu	10.548	1.93
3	Sanrobone	17.236	2.45
4	Kepulauan Tanakeke	7.943	3.29
5	Polombangkeng Selatan	31.373	1.86
6	Pattallassang	41.964	1.58
7	Polombangkeng Utara	54.429	2.20
8	Galesong Selatan	30.001	2.65
9	Galesong	45.550	2.62
10	Galesong Utara	44.338	2.70
KAB. TAKALAR		**329.997**	**2.33**

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka 2025

Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 329.997 jiwa yang terdiri atas 161.491 jiwa penduduk laki-laki dan 168.506 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 96.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar tahun 2024 mencapai 582 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Galesong Utara dengan kepadatan sebesar 3.000 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Polombangkeng Utara sebesar 256 jiwa/Km2.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per KecamatanKabupaten Takalar Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	% Penduduk	Jumlah Penduduk (Org)	Kepadatan Penduduk (Org/ Km2)
1.	Mangarabombang	100,50	13,82	45.615	453,88
2.	Mappakasunggu	15,12	3,20	10.548	697,62
3.	Sanrobone	29,36	5,22	17.236	587,06
4.	Polongbangkeng Selatan	88,07	9,51	7.943	356,23
5.	Pattallassang	25,31	12,72	31.373	1.658,00
6.	Polongbangkeng Utara	212,25	16,49	41.964	256,44
7.	Galesong Selatan	24,71	9,09	54.429	1.214,12
8.	Galesong	25,93	13,80	30.001	1.756,65
9.	Galesong Utara	15,11	13,74	45.550	3.000,53
10.	Kepulauan Tanakeke	30,15	2,41	44.338	263,45
Takalar		**566,51**	**100,00**	**329.997**	**582,51**

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka 2025

Populasi penduduk terbanyak terdapat pada kelompok umur 5 – 9 Tahun yaitu sebanyak 30.013 jiwa atau 9,21% dari total penduduk Kabupaten Takalar sementara populasi penduduk terkecil terdapat pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 5.493 jiwa atau 1,68% dari total jumlah penduduk Kabupaten Takalar tahun 2023.

Tabel I.18.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI	(%)	PEREMPUAN	(%)	jiwa	(%)
1	00-04	12.022	3,6	11.194	3,4	23.216	7,0
2	05-09	15.797	4,8	14.877	4,5	30.674	9,3
3	10-14	15.245	4,6	14.250	4,3	29.495	8,9
4	15-19	12.513	3,8	12.092	3,7	24.605	7,5
5	20-24	14.052	4,3	14.173	4,3	28.225	8,6
6	25-29	12.658	3,8	12.682	3,8	25.340	7,7
7	30-34	12.166	3,7	12.181	3,7	24.347	7,4
8	35-39	11.382	3,4	11.783	3,6	23.165	7,0
9	40-44	10.895	3,3	12.056	3,7	22.951	7,0
10	45-49	10.468	3,2	11.617	3,5	22.085	6,7
11	50-54	9.689	2,9	10.725	3,3	20.414	6,2
12	55-59	8.147	2,5	9.548	2,9	17.695	5,4
13	60-64	6.267	1,9	7.365	2,2	13.632	4,1

14	65-69	4.203	1,3	5.042	1,5	9.245	2,8
15	70-74	2.739	0,8	3.320	1,0	6.059	1,8
16	>=75	3.248	1,0	5.601	1,7	8.849	2,7
Takalar		**161.491**	**48,9**	**168.506**	**51,1**	**329.997**	**100,0**

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka 2025

Tabel II.18 Menunjukan bahwa berdasarkan jenis kelamin, sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Takalar jumlah penduduk laki laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan dengan besaran rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 2,1. Berdasarkan kelompok umur dapat dilihat bahwa pada kelompok umur tertentu, jumlah penduduk perempuan lebih banyak di banding penduduk laki-laki rasio jenis kelamin diatas 4,8 terdapat pada kelompok umur 35-39tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun dan kelompok umur 50 –54 tahun.

1.2.10. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan social. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,diantaranya adalah : Angka kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar pada periode 2019-2024 mengalami penurunan tiap tahunnya, Tahun 2019 sebesar 8,7% (25.930 jiwa), turun menjadi 8,44% (25.380 jiwa) pada Tahun 2020. Selanjutnya tahun 2021 juga menurun menjadi 8,25% (24.600 jiwa) dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 8.25% (24.750 Jiwa). Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,29% (25.010 Jiwa) dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 7,75% (23.510 Jiwa). Angka kemiskinan di Kabupaten Takalar menunjukkan tren yang menurun dalam kurun waktu 2019-2021 namun pada Tahun 2023, Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten Takalar meningkat. Dengan peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sampai ke Pemerintah Desa sangat mendukung penurunan angka kemiskinan.

Berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menekan peningkatan angka kemiskinan sehingga pada tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Takalar menurun.

Tabel I.19.
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan
KabupatenTakalar Tahun 2019 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ capital/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	356.973	25,93	8,7
2020	364.378	25,38	8,44
2021	380.564	24,6	8,25
2022	399.062	24,75	8,25
2023	428.941	25,01	8,29
2024	455,793	23,51	7,75

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka 2025

Pertumbuhan Ekonomi Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah yakni dengan mencermati nilai dan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 mencapai 13.428,09 miliar rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12.868,38 miliar rupiah pada tahun 2023. Adapun kontribusi terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024 di Kabupaten Takalar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 49,60 persen. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 mencapai angka 7.832,68 miliar rupiah.

Tabel I.20.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2019-2024

No	Tahun	PDRB adh berlaku (milyar Rp.)	PDRB adh konstan (milyar Rp.)	Perkembangan(persen)
1	2019	10.157,35	6.616,25	6,87
2	2020	10.220,31	6.575,76	-0,61
3	2021	11.126,11	6.908,05	5,05
4	2022	12.257,05	7.228,40	4,64
5	2023	12.868,38	7.507,06	3,86
6	2024	13.428,09	7.832,68	4,34
Rata-rata		11.325,84	6.967,10	3,96

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka 2025

Bila diperhatikan selama periode 2019-2024, perekonomian Kabupaten Takalar relatif stabil sampai Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 6.87 persen per tahun, namun pada Tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar dengan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negative yakni sebesar -0,61 persen sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi sampai dengan Tahun 2021 menjadi 5,05 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 menurun menjadi 3,86 persen dan naik menjadi 4.34 pada tahun 2024.

D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan ditetapkan pada tanggal 10 Februari 1960. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai ibu kota Kabupaten Takalar. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan tanggal 10 Februari 1960 sebagai Hari jadi Kabupaten Takalat yang kemudian setiap tahun diperingati.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan penyesuaian sesuai dengan aturan baru tersebut penataan organisasi

melalui proses pemetaan urusan wajib dan urusan pilihan melalui proses verifikasi dan validasi oleh masing-masing kementerian urusan pemerintahan dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur, dari hasil proses verifikasi dan validasi data akan menentukan tipe dari organisasi.

Pada tahun 2024 ini berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar kembali mengalami perubahan dengan penggabungan dan pembentukan perangkat daerah baru yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perubahan jumlah, nama dan tipe Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel I.21.
Jumlah dan Nomenklatur OPD Pemerintah Kabupaten Takalar

NO	Nama OPD	Tipe
1.	Sekretariat Daerah	B
2.	Sekretariat DPRD	C
3.	Inspektorat	B
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A
5.	Dinas Kesehatan	A
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
7.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	A
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	A
12.	Dinas Perhubungan	B
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16.	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	B
17.	Dinas Perikanan	B
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	A
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	A
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	A
22.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	B

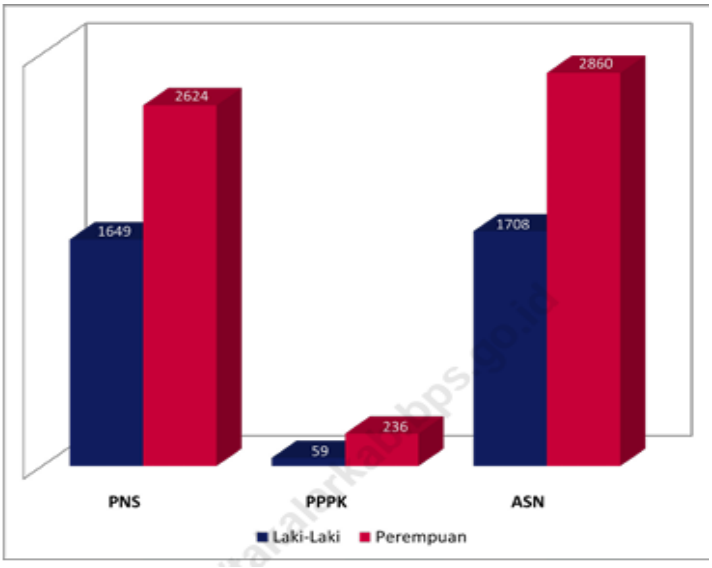
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia	B
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A
26.	Badan Pendapatan Daerah	A
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A
28.	Kecamatan Pattallassang	A
29.	Kecamatan Polongbangkeng Utara	A
30.	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	A
31.	Kecamatan Mangarabombang	A
32.	Kecamatan Mappakasunggu	A
33.	Kecamatan Sanrobone	A
34.	Kecamatan Galesong Selatan	A
35.	Kecamatan Galesong Utara	A
36.	Kecamatan Galesong	A
37.	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	B

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (2024)

Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat/Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Takalar mempunyai 10 Kecamatan, 24 Kelurahan, 76 desa dan 1 desa persiapan.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2024 berjumlah 4.273 orang PNS dan 295 orang PPPK.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Takalar Menurut Jenis ASN dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024



Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 4.273 orang dan 295 orang PPPK di pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda yaitu: Sarjana, Magister, dan Doktor sebanyak 84% Diploma III berjumlah 5 %, Diploma II berjumlah 2 %, SLTA berjumlah 8%, dan sisanya merupakan pegawai berpendidikan SLTP kebawah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RPD KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang akan substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabatan dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembagunandaerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun sebagai agenda pembangunan yang menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksnakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Oleh karena itu, RPJMD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan arahan Inmendagri No. 70 Tahun 2021, perumusan tujuan dan sasaran RPD didasarkan pada visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat serta isu aktual. Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diubah melalui RPD ini. Tujuan dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam rangka tercapainya tujuan. Sasaran juga dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Indikator tujuan dan sasaran akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) bagi kepala daerah yang akan

dilaporkan pencapaiannya setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah

Visi RPJPD Kabupaten Takalar 2005-2025 adalah:

Masyarakat Mandiri, Demokratis,
Berkeadilan Sosial dan Sejahtera Lahir-Bathin

Visi RPJPD Kabupaten Takalar memiliki filosofi bahwa kemajuan yang dicapai melalui pembangunan idealnya mengantar daerah tersebut pada kondisi kemandirian dalam mengelola sumberdaya tanpa mengabaikan interaksi dengan daerah lain. Dalam rangka ini, daya saing daerah menjadi sangat penting, baik untuk kemandirian maupun untuk interaksi dengan daerah lain. Visi RPJPD Kabupaten Takalar juga menekankan kondisi demokratis dan berkeadilan sosial sebagai satu kesatuan cita-cita ideal yang penekanannya pada pemerataan atas kesejahteraan yang dicapai secara bersama. Kesejahteraan tersebut idelanya mencakup dimensi lahir dan bathin, karena itu ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara menjadi keniscayaan dari pencapaian pembangunan.

Misi RPJPD Kabupaten Takalah 2005-2025 adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah.
2. Peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik dan pemerintahanyang demokratis.
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek.
4. Peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraanmasyarakat secara material.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama serta penghayatan nilainilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bathiniah.

Sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Takalar Tahap Keempat secara garisbesar mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas hidup manusia
2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah

3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram lahir-bathin
6. Terpeliharanya kondisi lingkungan hidup Daerah

Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksternal dan internal daerah, maka isu-isu aktual yang dihadapi saat ini adalah:

1. Pemulihan dari dampak pandemik Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan terutama aspek kesehatan dan perekonomian.
2. Ketidakpastian arah perkembangan perekonomian akibat gejolak antar negara pada level global yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah di Indonesia.
3. Dinamika politik nasional dan daerah terkait penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024

2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan target Pemerintah Kabupaten Takalar

Mengacu kepada visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan serta isu aktual, maka rumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Takalar 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL II.1

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR 2026
			2021-2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN-1: MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH	INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)	2,445	2,45	2,453	2,5	2,51	2,51
	SASARAN-1.1.: MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MANUSIA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	67,72	68,83	69,7	70,31	70,54	70,54
	SASARAN-1.2: MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH	INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH	29.170	29.174	29.178	29.182	29.186	29.186
2	TUJUAN-2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN RAMAH LINGKUNGAN	PDRB/KAPITA	33,97 JUTA	34,03	34,07	34,11	34,15	34,15
		INDEKS GINI	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	SASARAN-2.1: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,05	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78	6.22-7.78
		TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	4,16	4	3,96	3,91	3,86	3,86
	SASARAN-2.2: BERKURANGNYA PENDUDUK MISKIN	ANGKA KEMISKINAN (%)	8,25	7,09%	6,90%	6,69%	6,60%	6,60%
	SASARAN-2.3.: TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLHD)	58,98	59,02	59,06	59,1	59,14	59,14

3	TUJUAN 3: MEMPERBAIKI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH	C (49,49)	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)
	SASARAN 3.1.: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	NILAI SAKIP DAERAH	CC (59,38)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
		INDEKS KEPATUHAN TERHADAP SPM	46,11	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100
	SASARAN 3.2.: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	BELUM DINILAI	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
	SASARAN 3.3.: TERPELIHARANYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	ANGKA KRIMINALITAS	96,41 PER 100,000 PENDUDUK	91,91	89,41	86,91	84,41	84,41

3) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah (impact based). Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut :

TABEL II.2

PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	REALISASI TARGET TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR 2026
			2021-2022		2023	2024	2025	2026	
1	INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)	ANGKA	2,445	2,447	2,45	2,453	2,5	2,51	2,51
2	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	ANGKA	67,72	67,74	68,83	69,7	70,31	70,54	70,54
3	INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH	ANGKA	29.170	29.172	29.174	29.178	29.182	29.186	29.186
4	PDRB/KAPITA	JUTA RUPIAH	33,97 JUTA	33,99 Juta	34,03	34,07	34,11	34,15	34,15
5	RASIO GINI	ANGKA	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
6	PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	5,05	4.10-5.55	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78	6.22-7.78
7	TINGKAT PENGANGGURANTERBUKA (TPT)	PERSEN	4,16	4,16	4,00	3,96	3,91	3,86	3,86
8	PERSENTASE PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMISKINAN (ANGKA KEMISKINAN)	PERSEN	8,25%	7,35%	7,09%	6,90%	6,69%	6,60%	6,60%

9	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLHD)	POINT	58,98	59,00	59,02	59,06	59,10	59,14	59,14
10	INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH	ANGKA	C (49,49)	B (70,00)	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)
11	NILAI SAKIP DAERAH	PREDIKAT	CC (59,38)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
12	INDEKS KEPATUHAN TERHADAP SPM	INDEKS	46,11	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100
13	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	BELUM DINILAI	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
14	ANGKA KRIMINALITAS	KASUS PER 100.000 PENDUDUK	96,41 PER 100,000 PENDUDUK	94,41	91,91	89,41	86,91	84,41	84,41

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis kemudian dijabarkan pada kegiatan tahunan dalam bentuk perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini antaralain:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dansasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Takalar Tahun 2023 dibuat berdasakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 2023-2026. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2024 terdiri atas 8 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja serta didukung dengan 258 Program pendanaan dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 yang ada padamasing-masing Perangkat Daerah.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,453
		2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,7
2	Meningkatnya Daya SaingInfrastruktur	1	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	29,178
3	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga KerjaSektor-sektor Perekonomian Daerah	1	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,07
		2	Rasio Gini	Angka	0,35
		3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.04-6.52
4	Berkurangnya PendudukMiskin	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,96
		2	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persen	6,90
5	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,06
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (73-78)
		2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B(>60-70)
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	70-80
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	BAIK
8	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban	1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	89,41

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	611.014.203.444

2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.949.162.360
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	649.240.500
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	152.743.000
9	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	276.730.700
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	437.921.500
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	461.439.800
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	193.022.206.461
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.535.712.500
14	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	50.000.000
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	481.502.900
16	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.620.379.000
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.179.995.200
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.143.100.100
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	164.000.000
21	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	25.703.932.715
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	34.447.835.000
23	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	17.640.000
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	367.990.000
25	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	210.000.000
26	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	249.980.000
27	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.635.015.700
28	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	806.839.000
29	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.674.435.150
30	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	520.000.000
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.000.000

32	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	204.802.400
33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.197.600
34	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	101.000.000
35	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.000.000
36	PROGRAM PENATAAN DESA	2.000.000
37	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.000.000
38	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	768.200.000
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	9.999.900
40	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	406.000.000
41	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	138.012.600
42	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.056.368.300
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.761.600.000
44	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	87.497.500
45	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0
46	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.016.623.700
47	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.357.660.800
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.000.000
49	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	519.909.400
50	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	999.900
51	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.500.000.000
52	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20.624.000
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	75.908.000
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	118.987.400
55	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	999.000
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.040.000
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.608.821.300
58	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	726.434.000

59	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	30.000.000
60	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	115.000.000
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	12.000.000
62	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	812.944.500
63	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0
64	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.536.000.000
65	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.006.789.200
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	15.000.000
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	10.000.000
68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.500.000
69	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	15.000.000
70	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	56.532.400
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	22.500.000
72	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	616.557.000
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	15.000.000
74	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	446.000
75	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	15.000.000
76	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	174.960.000
77	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	597.785.000
78	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	120.000
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	500.000.000
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	850.045.840
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	499.999.800
82	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	305.668.600
83	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	400.000.000
84	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0

85	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	270.000.000
86	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.975.672.000
87	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	75.000.000
88	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	5.500.000
89	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.500.000
90	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	2.000.000
91	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	714.851.300
92	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	595.294.650
93	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	219.999.877
94	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.086.979.800
95	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.091.784.000
96	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	561.980.000
97	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20.000.000
98	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	59.400
99	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	230.000.000
100	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100.000.000
101	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000
102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.063.000
103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	40.000.000
104	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.304.356.700
105	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	820.000.000
106	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.804.461.420
107	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.150.900.000
108	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	479.388.500
109	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.025.118.900
110	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	176.876.189.409
111	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.217.365.800

112	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.024.551.800
113	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	606.224.000
114	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.140.537.800
115	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	877.800.000
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.050.000
117	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.082.365.348
118	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.471.600
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.420.000
120	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.377.400
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.621.200
124	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0
125	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.725.000
126	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.425.000
127	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000
128	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.450.000
129	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	615.621.600
130	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	23.764.869.000
131	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	7.556.400
132	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	13.020.000
133	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	670.190.300
J U M L A H		**1.289.565.280.374**

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Takalar, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.133.004.446.374,00- dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.094.704.391.843,00- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN	
		DPA	DPPA
1	BELANJA OPERASI	991.110.147.257,00	954.178.765.904,46
2	BELANJA MODAL	141.894.299.117,00	140.525.625.939,00
Jumlah		1.133.004.446.374,00	1.094.704.391.843,46

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diharapkan (target) dengan kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dan dilakukan secara berkala baik itu (triwulan) maupun tahunan. Pengukuran danpembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel III.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Inteval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Hingga akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan target kinerja seperti yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran Kinerja yang memuat realisasi capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL III.2.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS 1 **MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MANUSIA**						
	Indikator Kinerja	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,453	3,40	138,6	ST
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,7	72,06	103,4	ST
SASARAN STRATEGIS 2 **MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR**						
	Indikator Kinerja	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,178	3,72	12,75	SR
SASARAN STRATEGIS 3 **MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SECTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH**						
	Indikator Kinerja	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1.	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,07	42,36	124,33	ST
2	Rasio Gini	Angka	0,35	0,385	90	T
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04 - 6,52	4,34	75,08	S
SASARAN STRATEGIS 4 **BERKURANGNYA PENDUDUK MISKIN**						
	Indikator Kinerja	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Kode**
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,96	3,84	103,03	ST
2	Persentase Pendudukdi bawah Garis Kemiskinan	Persen	6,90	7,75	87,68	T
SASARAN STRATEGIS 5 **TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,06	67.21	113,8	ST
SASARAN STRATEGIS 6 **MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (73-75)	B(68,26)	92,24	ST
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (>60-70)	B(64,05)	100	ST

SASARAN STRATEGIS 7 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
1	Indeks Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	70-80	82.39	109,85	ST
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	100	ST
SASARAN STRATEGIS 8 TERPELIHARANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN						
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	89,41	19,96	177,68	ST

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian pengukur Indikator Kinerja Utama di Tahun 2024 dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MANUSIA				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2024**	**Sumber Data**
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	138,6	BRIN (Buku Indeks Daya Saing Daerah 2024)
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	103,4	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2024**	**Sumber Data**
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	12,75	BRIN (Buku Indeks Daya Saing Daerah 2024)
SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS DAN PENYERAPAN TENAGAKERJA SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2024**	**Sumber Data**
1.	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	124,33	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024

2	Rasio Gini	Angka	90	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	75,08	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
SASARAN STRATEGIS 4 BERKURANGNYA PENDUDUK MISKIN				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2024**	**Sumber Data**
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	103,03	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
2	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Persen	87,67	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
SASARAN STRATEGIS 5 TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2024**	**Sumber Data**
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	113,8	Profil Kualitas Lingkungan Hidup (Kementerian Lingkungan Hidup)
SASARAN STRATEGIS 6 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2024**	**Sumber Data**
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,24	Bagian Organisasi Setda Kab. Takalar(LHE KemenPan RB)
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	100	Bagian OrganisasiSetda Kab. Takalar(LHE KemenPan RB)
SASARAN STRATEGIS 7 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
Indikator Kinerja		**Satuan**	**Capaian Kinerja Tahun 2024**	**Sumber Data**
1	Indeks Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	109,85	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Takalar
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	BappelitbangdaKab. Takalar
SASARAN 8 TERPELIHARANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	177,68	Satpol PP dan Damkar Kab. Takalar

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja dilakukan untuk melihat perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya serta sebagai proyeksi untuk target pencapaian kinerja di tahun akhir RPJMD. Analisis ini juga berfungsi untuk mencari tahu apa penyebab keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja tahun 2024 untuk masing – masing sasaran strategis dapat dilihatsebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,453	3,40	138,6
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,7	72,06	103,4

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada tabel perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024, Capaian kinerja pada sasaran 1 telah mencapai nilai rata-rata capaian sebesar 121% dengan kriteria sangat tinggi (ST).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2023	2024
1	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	131	138,6
2	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	104	103,4

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya pada sasaran I mencapai peningkatan capaian sebesar 3,5% dimana Indikator mengalami peningkatan sedangkan Indikator kedua

mengalami penurunan.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka menengah RPD

Tabel. III.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,453	3,305	134,73
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,7	71,76	102,96
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN					**118,84%**

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari RPD 2023 – 2026. Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian pada Sasaran 1 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 118,84% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Aspek tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam Penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) terdapat 12 Pilar/Variabel meliputi pilar Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan, Efesiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Kesiapan Teknologi, Dinamika Pasar, dan Kapasitas Inovasi yang menjadi komponen daya saing daerah (BRIN, 2021- 2024).

Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), menunjukkan bahwa Kabupaten Takalar pada tahun 2021 memperoleh

nilai 2,455 atau predikat berdaya saing SEDANG. Hasil tersebut meningkat dari hasil sebelumnya pada tahun 2020 dengan nilai 1.2000 atau predikat RENDAH. Sedangkan pada tahun 2022, kembali mengalami peningkatan Indeks dengan capaian 2,84 dengan predikat SEDANG. Pada tahun 2023 nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3.21 dan pada Tahun 2024, nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar kembali lagi mengalami peningkatan menjadi 3,40 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut

Kabupaten/Kota	**Nilai Indeks**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nasional	-	-	3.26	3.44	3.43
Sulsel	-	3.138	3.35	3.70	3.61
Takalar	**1.2000**	***2.455***	***2.84***	***3.21***	***3.40***

Berdasarkan pemetaan Indeks Daya Saing Daerah tahun 2023, terdapat 4 aspek dan 12 pilar yang menjadi fokus daya saing daerah Kabupaten Takalar sebagaimana pada tabel berikut:

No	**Aspek/Pilar**	**2024**
I	**Aspek Lingkungan Pendukung**	**3,95**
1	Institusi	4,27
2	Infrastruktur	3,72
3	Adopsi TIK	4,53
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,27
II	**Aspek Sumber Daya Manusia**	**3,73**
5	Kesehatan	3,58
6	Keterampilan	3,87
III	**Aspek Pasar**	**2,97**
7	Pasar Produk	2,72
8	Pasar Tenaga Kerja	2,85
9	Sistem Keuangan	2,34
10	Ukuran Pasar	3,98

IV	**Aspek Ekosistem Inovasi**	**2,82**
11	Dinamisme Bisnis	3,81
12	Kapabilitas Inovasi	1,83
NILAI IDSD		**3,40**

Dari tabel tersebut dapat tergambar bahwa masih terdapat 2 (dua) aspek yang membutuhkan perhatian dan perbaikan yaitu aspek pasar dan aspek Ekosistem Inovasi. Untuk itu, dalam rangka membangun daya saing daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

a. Melakukan pemetaan potensi daerah mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten;
b. Mendorong upaya-upaya peningkatan layanan publik;
c. Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk pengembangan SDM;
d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
e. Menumbuhkembangkan iklim inovasi;
f. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal;
g. Selalu meningkatkan kesiapan kapabilitas pemerintah daerah termasuk kemampuan dalam mengelola keuangan daerah

Sementara untuk Indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) merupakan penilaian yang terdiri dari 4 (empat) Indikator penghitung yaitu harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita. Dimana pada tahun 2024, Kabupaten Takalar berhasil meningkatkan IPM dari nilai 71,46 menjadi 72,06 (peringkat 19 dari 24 Kab/kota di Sulawesi Selatan).

Hal ini didukung dengan adanya solusi yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Takalar antara lain:

1. untuk indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

yaitu:

a. Adanya program Penanganan ATS di Kabupaten Takalar
b. Adanya program PAUD-HI (Pendidikan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)

2. Untuk indikator Angka Harapan Hidup yaitu:
   a. Adanya keberhasilan pada program percepatan penurunan stunting
   b. Semakin meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan
   c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
   d. Kualitas layanan Kesehatan
   e. Efektifitas Penanganan Kesehatan
3. Untuk indikator pengeluaran perkapita yaitu:
   a. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
   b. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitasharga
   c. Memperluas kesempatan kerja terutama di sector non pertaniandi wilayah pedesaan.
   d. Menurunkan angka kemiskinan

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,178	3,72	12,75

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 pada tabel perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024, Capaian kinerja pada sasaran 1 telah mencapai nilai rata-rata capaian sebesar 12,75% dengan kriteria Sangat Rendah (SR).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2023	2024
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	10,934	12,75

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya pada Indikator sasaran I mengalami peningkatan mencapai 1,82% dari tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini target jangka menengah RPD

Tabel. III.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,178	3,46	11,85

Target tahun 2024 merupakan target tahun kedua pada RPD 2023-2026 Kabupaten Takalar. Berdasarkan tabel di atas, maka data disimpulkan perbandingan capaian kinerja target RPD Tahun 2024 dengan rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini (Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024) sebesar 11,85%.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Untuk capaian Tahun 2024 dengan target sebesar 29,174 dan realisasi sebesar 3,72 memperoleh capaian sebesar 12,75% dengan Kriteria Capaian SR (Sangat Rendah). Namun, ini bukan merupakan kegagalan dalam pencapaian kinerja hanya karena penetapan target yang terlampau tinggi dan hal ini telah

kami perbaiki dengan adanya Laporan Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dengan melakukan revisi target kinerja. Ini bisa juga dibuktikan dengan data yang telah diterbitkan diterbitkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional dalam Buku Indeks Daya Saing Daerah 2024 dimana Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah merupakan pilar 2 (dua) perhitungan Indeks Daya Saing Daerah dan Kabupaten Takalar masuk dalam urutan 6 dari 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

PROVINSI SULAWESI SELATAN

3,61
SKOR IDSD 2024
PROVINSI
SULAWESI SELATAN

4
kab/kota
≥ skor provinsi

NAMA KABIKOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. SULAWESI SELATAN	4,07	3,52	3,56	4,33	3,86	4,13	2,41	2,66	2,80	4,71	3,56	3,68	3,61
RATA-RATA KABIKOTA	4,32	3,32	4,32	3,65	3,77	4,03	3,15	2,95	1,98	4,11	3,63	2,14	3,45
KEPULAUAN SELAYAR	4,03	3,30	4,21	4,02	3,67	4,18	2,37	2,69	1,72	3,70	3,45	1,80	3,26
KAB. BULUKUMBA	4,04	3,61	4,40	3,81	3,66	4,27	3,24	3,23	1,89	4,09	3,12	2,31	3,47
BANTAENG	3,97	3,55	4,44	3,23	3,85	3,78	2,96	3,20	2,35	3,98	3,14	1,97	3,37
JENEPONTO	4,10	3,66	4,43	3,70	3,50	3,74	3,23	2,37	2,07	3,97	4,41	1,50	3,39
TAKALAR	4,27	3,72	4,53	3,27	3,58	3,87	2,72	2,85	2,34	3,98	3,81	1,83	3,40
GOWA	4,29	3,70	4,42	3,54	3,83	4,06	3,71	3,27	2,25	4,33	4,13	2,30	3,65
SINJAI	4,53	3,75	4,32	3,88	3,58	4,18	2,81	3,24	1,38	4,03	3,94	2,40	3,50
MAROS	4,61	3,89	4,54	2,71	3,71	4,06	4,06	3,07	2,34	4,26	4,02	1,84	3,59
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	4,63	4,12	4,60	3,39	3,53	3,94	1,50	2,97	1,34	4,40	3,76	2,65	3,40
BARRU	4,53	3,99	4,19	4,02	3,72	4,06	3,00	2,63	1,92	3,84	3,55	1,61	3,42
BONE	4,46	3,75	4,27	3,80	3,58	3,96	2,33	2,53	1,12	4,52	3,34	2,60	3,35
SOPPENG	4,62	3,25	4,23	3,70	3,80	3,99	3,19	2,87	1,51	4,02	3,72	2,02	3,41
WAJO	4,60	3,03	4,63	3,14	3,60	4,07	3,09	2,39	1,50	4,26	2,97	2,23	3,29
SIDENRENG RAPPANG	4,14	3,28	4,21	3,72	3,82	4,18	2,62	2,85	1,51	4,09	2,87	2,18	3,29
PINRANG	4,14	3,35	4,48	3,51	3,79	3,92	2,82	4,00	1,51	4,27	3,60	1,74	3,43
ENREKANG	4,50	3,26	4,14	3,36	3,87	4,53	2,31	2,36	1,53	3,81	4,04	2,01	3,31
LUWU	4,51	2,63	3,99	3,93	3,84	4,03	2,46	2,47	1,67	4,17	3,44	1,56	3,23
TANA TORAJA	4,01	2,68	3,87	3,63	4,09	4,05	4,31	2,80	2,52	3,81	3,57	2,94	3,52
LUWU UTARA	4,55	2,76	3,31	3,82	3,70	3,97	2,33	2,54	1,62	4,07	3,52	0,86	3,09
LUWU TIMUR	4,47	2,55	3,81	3,14	3,85	3,85	1,13	2,73	1,45	4,36	3,56	1,22	3,01
TORAJA UTARA	4,53	2,58	4,07	3,78	4,08	4,07	4,65	2,03	1,78	3,87	2,98	1,70	3,34
MAKASSAR	3,98	3,26	4,89	4,70	3,97	3,70	4,84	4,47	2,95	5,00	3,30	4,14	4,10
PAREPARE	4,20	2,85	4,89	3,86	3,90	4,21	5,00	4,22	4,29	3,85	4,98	2,88	4,09
PALOPO	4,03	3,18	4,77	3,96	3,87	4,06	4,91	2,98	3,06	3,90	3,86	3,18	3,81

Keberhasilan Kinerja ini dapat dicapai dengan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif (Dinas PUTRPKP) dengan pihak terkait seperti pihak legislatif dan komponen masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu juga didukung dengan adanya penambahan anggaran pada program Program Penyelenggaraan Jalan.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Produktifitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor - Sektor Perekonomian Daerah

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,07	42,36	124,33
2	Rasio Gini	Angka	0,35	0,385	90
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04 – 6,52	4,34	75,08

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 pada tabel diatas, nilai capaian pada sasaran telah mencapai rata-rata capaian 96,47% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST) dimana 1 (satu) indikator kinerja dengan capaan sangat tinggi (ST), 1 (satu) indikator kinerja dengan capaan tinggi (T) dan 1 (satu) indikator baru mencapai sasaran capaian sedang (S).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2023	2024
1	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	121	124,33
2	Rasio Gini	Angka	92,86	90
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	72,83	75,08

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya. Dimana ketiga indikator kinerja mengalami peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Tahun 2023, rata – rata capaian mencapai 95,56% sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 96,47% dengan peningkatan sebesar 0,91%.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka menengah RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,07	41,75	122,54
2	Rasio Gini	Angka	0,35	0,38	91,43
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04 – 6,52	4,1	68,79

Target tahun 2024 merupakan target tahun kedua pada RPD 2023-2026 Kabupaten Takalar. Berdasarkan tabel di atas, maka data disimpulkan perbandingan capaian kinerja target RPD Tahun 2024 dengan rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini (Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024) sebesar 94,25%.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 mencapai 13.428,09 miliar rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12.868,38 miliar rupiah pada tahun 2023. Adapun kontribusi terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024 di Kabupaten Takalar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 49,60 persen.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 mencapai angka 7.832,68 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar -0,61 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, yakni 5,05 persen pada tahun 2021, 4,64 persen pada tahun 2022, 3,86 persen pada tahun 2023, dan 4,34 pada tahun 2024.

Untuk indikator kinerja Angka Gini Rasio di Kabupaten Takalar Tahun 2024

mengalami kenaikan dari Tahun 2020 dari 0,356 menjadi 0,365 yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Takalar pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan rendah.

Sementara Ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2024 dibanding tahun 2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 2,25 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada hampir semua lapangan usaha, namun ada juga beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksi terbesar terjadi di lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar -2,78 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -2,08 persen. Adapun lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah jasa lainnya sebesar 10,37 persen dan jasa perusahaan sebesar 9,02 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,80 persen.

Adapun solusi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Takalar terkait Sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Penyerapan Tenaga Kerja dari berbagai sektor antara lain:

1. Melalui sektor pertanian dan perkebunan antara lain:
    a. Penyediaan Sarana Pertanian berupa pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen dan pasca panen yang terdiri dari 22 unit hand sprayer electric, 4 unit hand traktor, dan 13 unit pompa air.

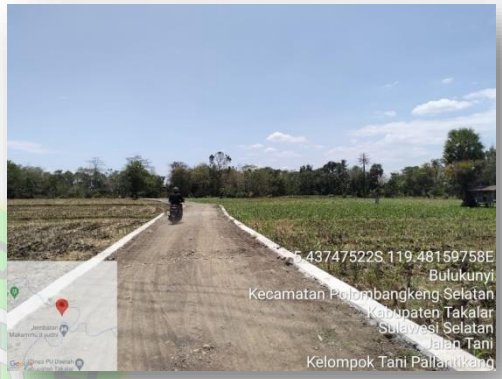






b. Penyediaan Prasarana pertanian berupa penyediaan prasarana irigasi dan jalan pertanian yang terdiri dari 6 unit irigasi air tanah dangkal, 2 unit irigasi air tanah dalam tanaman pangan, 3 unit dam parit dan 37 unit jalan usaha tani.



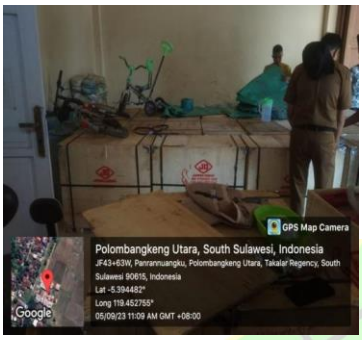


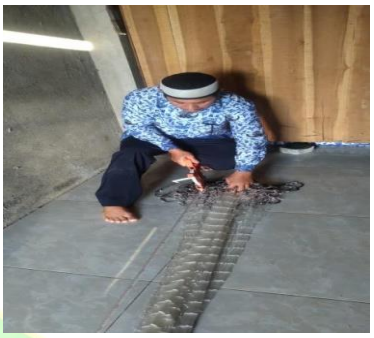
c. Dilakukan upaya peningkatan pengetahuan petani dalam bercocok tanam melalui sekolah lapang tematik dan demplot-demplot komoditi tanaman pangan. Penggunaan benih bersertifikat serta penanganan tanaman dengan penggunaan pupuk dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan yang memadai.

2. Melalui Sektor Perikanan, antara lain :
   a. Pengadaan Jaring kepiting
   b. Pengadaan Perahu
   c. Pengadaan Mesin Perahu
   d. Pengadaan Jaring Ikan
   e. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 satu) Daerah Kabupaten/Kota
   f. Pengadaan Bibit Ikan bandeng
   g. Pengadaan Bibit rumput Laut euchema cottoni











3. Melalui sektor peternakan, antara lain dengan adanya:
   a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian/peternakan
   b. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
   c. Program perizinan usaha pertanian
4. Melalui sektor Koperasi dan UMKM dengan adanya :
   a. Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan yang Efektif
   b. Meningkatkan Partisipasi Anggota
   c. Diversifikasi Layanan dan Produk Koperasi
   d. Akses Modal dan Keuangan yang Lebih Baik
   e. Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi dan Inovasi
   f. Pelatihan dan Pendidikan untuk Anggota dan Pengurus
   g. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung
   h. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi

i. Konsolidasi dan Kolaborasi antar Koperasi

5. Melalui sektor Penanaman Modal dengan adanya :
   a. Program pengembangan iklim penanaman modal
   b. Program promosi penanaman modal
   c. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

4. Sasaran 4 : Berkurangnya Penduduk Miskin

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,96	3,84	103,33
2	Persentase Penduduk di bawah garis Kemiskinan	Persen	6,90	7,75	87,67

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 4 pada tabel perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024, Capaian kinerja pada sasaran 4 telah mencapai nilai rata-rata capaian sebesar 95,5% dengan kriteria sangat tinggi (ST).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian (%)	
			2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	110,5	103,03
2	Persentase Penduduk di bawah garis Kemiskinan	Persen	83,07	87,67

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya pada sasaran 4 yaitu pada tahun 2023 rata-rata capaiannya sebesar 96,79% sedangkan Tahun 2024 rata-rata capaiannya sebesar 95,5% . Yang berarti bahwa pada tahun 2024 capaian sasaran 4 mengalami penurunan sebesar 1,29% dibandingkan tahun 2023.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka menengah RPD

Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	3,84	100,52
2	Persentase Penduduk di bawah garis Kemiskinan	6,60%	7,75%	82,57

Target tahun 2024 merupakan target kedua dari target RPD Kabupaten Takalar. Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian pada Sasaran 4 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 91,55% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan (faktor pendukung) pada sasaran 4 berkurangnya penduduk miskin dipengaruhi antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang efektif dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh wirausaha mikro untuk mengelola usaha mereka secara lebih profesional. Pelatihan yang mencakup aspek manajemen keuangan, pemasaran, strategi pengembangan produk, dan pengelolaan sumber daya manusia sangat penting untuk mengurangi risiko kegagalan usaha. Dengan adanya pengetahuan ini, pelaku usaha mikro lebih mampu menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang pasar.
2. Penempatan tenaga kerja yang melebihi target dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, baik yang berasal dari internal perusahaan (seperti perencanaan yang kurang tepat atau penurunan produktivitas) maupun faktor eksternal (seperti fluktuasi permintaan pasar, musiman, atau kebijakan pemerintah). Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat menyebabkan perusahaan harus meningkatkan jumlah tenaga kerja agar target operasional atau produksi tercapai. Keberhasilan dalam mengelola faktor-faktor ini akan sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan atau organisasi mengelola tenaga kerja dan mengoptimalkan kinerja mereka.
3. Persentase (%) Pelayanan pencapaian pelaksanaan Penyaluran Bantuan

Pangan Non Tunai dan Bantuan KUBE ini disebabkan tersedianya anggaran dan data yang akurat.

Sedangkan Penyebab kegagalan (faktor penghambat) dipengaruhi antara lain:

1. tidak maksimalnya kinerja serta plot anggaran yang dialokasikan tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang direncanakan
2. kurangnya Dukungan Kapasitas Sumber daya manusia dan keterbatasan Jumlah Anggaran yang ada.
3. pendampingan yang kurang maksimal sesuai kondisi dilapangan dengan menerapkan :
   - Mengacu pada SOP yang ada
   - Memaksimalkan potensi SDM yang ada

5. Sasaran 5 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,06	67,21	113,8

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5 pada tabel perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024, Capaian kinerja pada sasaran 5 dengan nilai capaian sebesar 113,8% dengan kriteria sangat tinggi(ST).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	110,5	103,03

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya pada sasaran 5 yaitu pada tahun 2023 capaiannya sebesar 110,5% sedangkan Tahun 2024 capaiannya sebesar 103,03% . Yang berarti bahwa pada tahun 2024 capaian sasaran 5 mengalami penurunan sebesar 7,47% dibandingkan tahun 2023.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka menengah RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian(%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,14	67,21	113,65

Target tahun 2024 merupakan target kedua dari target RPD Kabupaten Takalar. Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian pada Sasaran 5 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 113,65% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran ini, penilaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan Kabupaten Takalar dilakukan berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan. Pada penilaian kualitas air, walaupun kualitas air berada pada level standar tetapi kegiatan ini memiliki kendala pada pelaksanaan pengujian laboratorium lingkungan yang belum beroperasi secara optimal. Pada pelaksanaan penilaian kualitas lingkungan dilaksanakan dengan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Kegiatan yang terselenggara untuk mendukung pencapaian sasaran ini yaitu dengan identifikasi serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Seperti contohnya penilaian kualitas udara dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan penilaian indeks kualitas tutupan lahan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penganggungjawaban usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup pada usaha yang telah memiliki izin. Izin tersebut dijabarkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang dimiliki

oleh usaha atau kegiatan yang telah berizin. Umumnya industry/kegiatan yang mengajukan dokumen Amdal, UKL/UPL hanya yang dilakukan oleh pelaku berskala menengah keatas, sementara industry kecil/rumah tangga umumnya tidak mengajukan perizinan lingkungan. Kemudian perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Takalar tidak semua memiliki cerobong udara yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam standar lingkungan.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar SKPD yang terkait dalam penanganan sektor lingkungan hidup dengan upaya mengurangi produksi sampah/limbah menjadi penyebab terhambatnya pencapaian target pengendalian kerusakan lingkungan. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan oleh Dinas Linkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2024 meliputi kegiatan Rehabilitasi Hutan Tanaman Mangrove, pemeliharaan RTH termasuk pada RTH bantuan Pemerintah Provinsi serta pengelolaan areal pertamanan. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang ditetapkan sebagai RTH tidak sebanding dengan peningkatan luas areal perkotaan.

6. Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (73-75)	B(68,28)	92,24
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B(>60-70)	B (64,05)	100

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 6 pada tabel perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024, Capaian kinerja pada sasaran 6 dengan nilai capaian sebesar 96,12% dengan kriteria sangat tinggi(ST).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian (%)	
			2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	73	92,24
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	97	100
RATA-RATA CAPAIAN			85	96,12

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya pada sasaran 6 yaitu pada tahun 2023 rata-rata capaiannya sebesar 85% sedangkan Tahun 2024 capaiannya sebesar 96,12% . Yang berarti bahwa pada tahun 2024 capaian sasaran 6 mengalami peningkatan sebesar 11,12% dibandingkan tahun 2023.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka menengah RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian(%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (79-80)	B(68,28)	85,89
2.	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB (71-80)	B (64,05)	84,83

Target tahun 2024 merupakan target kedua dari target RPD Kabupaten Takalar. Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian pada Sasaran 6 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 85,36% dengan kriteria Tinggi (T).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan 2 (dua) Indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada tabel diatas, pada Indikator Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan capaian sebesar 19,24% dan sudah berada pada predikat yang sama yaitu B, sementara untuk Indikator kedua dengan Nilai SAKIP Daerah mengalami peningkatan capaian sebesar 3% namun masih dalam predikat yang sama yaitu B.

Untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat mencapai target RPD tahun 2023 – 2026 dan telah mengalami peningkatan nilai dari tahun

sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari berbagai pihak dalam pengumpulan data pendukung pada saat penginputan pada aplikasi Portal RB Kemenpan RB. Namun masih tetap terkendala oleh data-data penginputan rencana aksi pada portal RB belum maksimal hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman terkait pemenuhan kebutuhan data pada Aplikasi portal RB.

Sementara untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Daerah, 100% Perangkat Daerah telah menyelesaikan Laporan Kinerja dan perjanjian kinerja dengan tepat waktu. Meskipun demikian, kualitas perencanaan dan pelaporan harus lebih ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Terkendalanya pelaporan baik itu laporan keuangan, LKj, LPPD dan sebagainya biasanya terjadi karena terlambatnya pengumpulan data primer maupun data pendukungnya sehingga proses pemasukan data juga terlambat.

Adapun solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kemenpan RB dan LHE Internal oleh Inspektorat
2. Melakukan Asistensi/pendampingan penyusunan dokumen SAKIP/ RB
3. Melakukan Monev pelaksanaan Peningkatan SAKIP dan RB
4. Meningkatkan Koordinasi baik dengan Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Perangkat Daerah terkait
5. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru

7. Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	70-80	82,39	109,85
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	100

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 7 pada tabel perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024, Capaian kinerja pada sasaran 7 dengan nilai capaian sebesar 104,925% dengan kriteria sangat tinggi(ST).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian (%)	
			2023	2024
1	Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	110,5	109,85
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,07	100
Rata- rata capaian			96,785	104,925

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya pada sasaran 7 yaitu pada tahun 2023 rata-rata capaiannya sebesar 96,785% sedangkan Tahun 2024 capaiannya sebesar 104,925% . Yang berarti bahwa pada tahun 2024 capaian sasaran 7 mengalami peningkatan sebesar 8,14% dibandingkan tahun 2023.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka menengah RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian(%)
1.	Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	70-80	88,09	117,45
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	Baik

Target tahun 2024 merupakan target kedua dari target RPD Kabupaten Takalar. Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian pada Sasaran 7 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 108,73% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kebijakan pemerintah mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dimana penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan tahapan diantaranya pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dari tahapan Standar Pelayanan Minimal tersebut mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu persyaratan agar Standar Pelayanan Minimal dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan, memprioritaskan dan menjamin pendanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Takalar. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing urusan yang menangani Standar Pelayanan Minimal adalah tetap memotivasi dan memfasilitasi kegiatan kedepannya untuk dapat berjalan dengan lancar dan secara optimal. Berbagai peraturan, termasuk petunjuk pelaksanaan maupun teknis dan instrumen masih perlu dilengkapi untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Adapun program-program pendukung setiap urusan yang menangani SPM yaitu :

1. Bidang Urusan Pendidikan dengan program Pengelolaan Pendidikan
2. Bidang Urusan Kesehatan dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dengan Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dengan Program Pengembangan Perumahan
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dengan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan

Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Bidang Urusan Sosial Dengan Program Rehabilitasi Sosial

Sementara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan oleh masyarakat serta untuk mengetahui dari aspek-aspek mana saja yang belum memenuhi kepuasan masyarakat dalam dilayani. Sekaitan dengan hal teresebut, maka guna mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam hal ini seluruh OPD/Instansi, Kecamatan, Rumah Sakit, dan seluruh Puskesmas dengan jumlah keseluruhan sebanyak 55 unit telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tingkat Kepuasan masing- masing instansi telah dijabarkan dengan Rata-rata nilai mutu dari 55 Instansi, seluruhnya menunjukkan hasil "BAIK". Oleh karena itu secara keseluruhan responden yang disebar semua di instansi, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memperoleh nilai IKM sebesar 3,45 poin dan nilai unsur sebesar 86,24 dengan predikat BAIK. Dari 55 Unit kerja yang menjadi lokasi survey, 20 Unit kerja memperoleh predikat rata-rata memperoleh nilai interval sekitar 3,5324 - 4,00 dan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100 atau SANGAT BAIK, kemudian terdapat 35 unit kerja memperoleh predikat rata- rata nilai interval sekitar 3,0644 - 3,532 dan Nilai Interval Konversi 76,61 - 88,30 atau kategori B (BAIK),

Berdasarakan data tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Takalar perlu memberikan Perhatian Khusus kepada Unit kerja yang memiliki unsur yang relatif rendah dibanding unsur yang lain pada setiap unit kerja. Beberapa upaya Peningkatan kualitas Sumber daya manusia terutama yang terkait langsung dengan pemberi layanan, perlu terus dilakukan secara berkala, baik diklat maupun pembinaan oleh pimpinan instansi unit kerja. Bersamaan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan juga, baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu, guna mewujudkan transparansi dalam pemberian layanan, maka seluruh instansi unit kerja perlu menjelaskan dan adanya SOP yang jelas dalam setiap Instansi Unit Kerja. Untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan, maka

survey Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan secara berkala, minimal sekali setahun, agar instansi Unit Layanan dapat melakukan perbaikan layanan sesuai dengan penilaian dan kebutuhan.

8. Sasaran 8 : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.00 Penduduk	89,41	19,96	177,68

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 7 pada tabel perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024, Capaian kinerja pada sasaran 7 dengan nilai capaian sebesar 177,68% dengan kriteria sangat tinggi(ST).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2023	2024
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.00 Penduduk	175,7	177,68

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya pada sasaran 7 yaitu pada tahun 2023 capaiannya sebesar 177,68% sedangkan Tahun 2024 capaiannya sebesar 175,7% . Yang berarti bahwa pada tahun 2024 capaian sasaran 7 mengalami peningkatan sebesar 1,98% dibandingkan tahun 2023.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka menengah RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian(%)
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.00 Penduduk	89,41	21,13	176,37

Target tahun 2024 merupakan target kedua dari target RPD Kabupaten Takalar. Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian pada Sasaran 8 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata

capaian sebesar 176,37% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja pada sasaran 8, Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban dalam hal ini disebabkan antara lain :

a. Membentuk Posko 3 Pilar (Binmas, Babinsa, dan kades)
b. Melaksanakan Sambang
c. Melaksanakan Jum'at Curhat (Binluh, menampung permasalahan masyarakat)
d. Melaksanakan patrol Gabungan (TNI, POLRI dan SATPOL PP setiap malam minggu)
e. Melaksanakan patrol Blueligth
f. Melaksanakan kegiatan KKYD

Adapun solusi yang dilaksanakan dalam penanganan angka kriminalitas antara lain dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti:

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan
b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi biaya = 100% - (Realisasi Biaya : Target Biaya x 100%)

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program kegiatan sebesar Rp.1.174.764.040.721,81 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.1.244.132.362.335,46. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase biaya pada level program adalah **5,6%** dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 69.368.321.613,65,-

Persentase Efisiensi biaya = 100%- ((1.174.764.040.721,81: 1.244.132.362.335,46)100%)

= 5,6%

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA)

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar Program Berdasarkan Urusan Kegiatan

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa	Persen
1	2	3	4	5	6
JUMLAH		**1.244.132.362.335,46**	**1.174.764.040.721,81**	**69.368.321.613,65**	**94,42%**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**771.616.223.824,00**	**733.519.221.425,81**	**38.097.002.398,19**	**95,06**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**371.647.202.931,00**	**359.056.075.794,00**	**12.591.127.137,00**	**96,61**
1.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**371.647.202.931,00**	**359.056.075.794,00**	**12.591.127.137,00**	**96,61**
1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	251.191.384.509,00	241.524.152.223,00	9.667.232.286,00	96,15
1.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	118.452.742.922,00	115.656.033.939,00	2.796.708.983,00	97,64
1.01	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
1.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	649.240.500,00	631.484.500,00	17.756.000,00	97,27
1.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	152.743.000,00	152.743.000,00	0,00	100,00
1.01	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	276.730.700,00	276.730.700,00	0,00	100,00

1.01	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	437.921.500,00	357.575.825,00	80.345.675,00	81,65
1.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	461.439.800,00	432.355.607,00	29.084.193,00	93,70
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**298.890.826.985,00**	**281.419.685.413,81**	**17.471.141.571,19**	**94,15**
1.02	**Dinas Kesehatan**	**184.555.208.777,00**	**168.961.280.225,81**	**15.593.928.551,19**	**91,55**
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.853.794.045,00	64.195.596.098,00	2.658.197.947,00	96,02
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	115.604.353.032,00	102.871.730.927,81	12.732.622.104,19	88,99
1.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.707.199.500,00	1.523.305.200,00	183.894.300,00	89,23
1.02	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	50.000.000,00	44.400.000,00	5.600.000,00	88,80
1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	339.862.200,00	326.248.000,00	13.614.200,00	95,99
1.02	**Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle**	**114.335.618.208,00**	**112.458.405.188,00**	**1.877.213.020,00**	**98,36**
1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.234.862.508,00	29.007.803.089,00	1.227.059.419,00	95,94
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	84.100.755.700,00	83.450.602.099,00	650.153.601,00	99,23
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**82.734.885.439,00**	**76.155.660.165,00**	**6.579.225.274,00**	**92,05**
1.03	**Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**82.734.885.439,00**	**76.155.660.165,00**	**6.579.225.274,00**	**92,05**
1.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.846.938.619,00	7.147.894.370,00	699.044.249,00	91,09
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.870.586.900,00	4.762.087.738,00	108.499.162,00	97,77
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.210.370.000,00	843.270.450,00	1.367.099.550,00	38,15
1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.416.219.100,00	1.404.328.760,00	11.890.340,00	99,16
1.03	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	219.522.000,00	218.577.000,00	945.000,00	99,57
1.03	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	23.642.108.444,00	22.555.452.945,00	1.086.655.499,00	95,40
1.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	37.515.509.076,00	35.397.881.459,00	2.117.627.617,00	94,36
1.03	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	22.640.000,00	22.604.700,00	35.300,00	99,84
1.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	367.990.000,00	365.523.500,00	2.466.500,00	99,33
1.03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	946.951.800,00	726.595.700,00	220.356.100,00	76,73
1.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	49.980.000,00	47.757.793,00	2.222.207,00	95,55

1.03	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.626.069.500,00	2.663.685.750,00	962.383.750,00	73,46
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**12.975.900.514,00**	**11.898.358.119,00**	**1.077.542.395,00**	**91,70**
1.05	**Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**10.173.016.477,00**	**9.607.927.279,00**	**565.089.198,00**	**94,45**
1.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.873.975.327,00	8.338.795.329,00	535.179.998,00	93,97
1.05	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	816.839.000,00	800.367.700,00	16.471.300,00	97,98
1.05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	482.202.150,00	468.764.250,00	13.437.900,00	97,21
1.05	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**2.802.884.037,00**	**2.290.430.840,00**	**512.453.197,00**	**81,72**
1.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.502.868.037,00	2.248.645.640,00	254.222.397,00	89,84
1.05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	300.016.000,00	41.785.200,00	258.230.800,00	13,93
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**5.367.407.955,00**	**4.989.441.934,00**	**377.966.021,00**	**92,96**
1.06	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	**5.367.407.955,00**	**4.989.441.934,00**	**377.966.021,00**	**92,96**
1.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.06	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	414.832.400,00	413.939.100,00	893.300,00	99,78
1.06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.197.600,00	9.094.300,00	103.300,00	98,88
1.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100.970.000,00	93.979.800,00	6.990.200,00	93,08
1.06	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.000.000,00	26.479.800,00	520.200,00	98,07
1.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.113.047.955,00	3.802.041.659,00	311.006.296,00	92,44
1.06	PROGRAM PENATAAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.06	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.000.000,00	7.488.500,00	511.500,00	93,61
1.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	689.360.000,00	631.418.775,00	57.941.225,00	91,59
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**88.751.621.171,00**	**82.016.018.312,00**	**6.735.602.859,00**	**92,41**
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN**	**11.386.446.185,00**	**9.728.169.578,00**	**1.658.276.607,00**	**85,44**
2.08	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	**11.386.446.185,00**	**9.728.169.578,00**	**1.658.276.607,00**	**85,44**

2.08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.826.648.285,00	3.470.828.590,00	355.819.695,00	90,70
2.08	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00
2.08	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	165.928.700,00	95.629.800,00	70.298.900,00	57,63
2.08	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	240.911.000,00	149.151.000,00	91.760.000,00	61,91
2.08	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	94.800.000,00	76.241.875,00	18.558.125,00	80,42
2.08	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.667.058.200,00	3.547.298.313,00	1.119.759.887,00	76,01
2.08	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.388.000.000,00	2.385.920.000,00	2.080.000,00	99,91
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**25.989.086.147,00**	**24.056.078.798,00**	**1.933.007.349,00**	**92,56**
2.09	**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan**	**25.989.086.147,00**	**24.056.078.798,00**	**1.933.007.349,00**	**92,56**
2.09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	267.426.350,00	257.132.300,00	10.294.050,00	96,15
2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.765.661.797,00	9.904.411.807,00	861.249.990,00	92,00
2.09	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.360.136.800,00	1.008.227.487,00	351.909.313,00	74,13
2.09	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.068.505.800,00	12.361.394.804,00	707.110.996,00	94,59
2.09	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.09	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	522.355.400,00	519.912.400,00	2.443.000,00	99,53
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**10.432.328.697,00**	**9.694.843.353,00**	**737.485.344,00**	**92,93**
2.10	**Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan**	**10.432.328.697,00**	**9.694.843.353,00**	**737.485.344,00**	**92,93**
2.10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	999.900,00	936.900,00	63.000,00	93,70
2.10	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	341.326.800,00	327.090.205,00	14.236.595,00	95,83
2.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.257.621.497,00	7.701.778.921,00	555.842.576,00	93,27
2.10	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20.624.000,00	20.173.000,00	451.000,00	97,81
2.10	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	95.936.000,00	95.691.200,00	244.800,00	99,74
2.10	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	101.450.500,00	77.999.500,00	23.451.000,00	76,88
2.10	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	999.000,00	999.000,00	0,00	100,00

2.10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	11.789.000,00	11.318.000,00	471.000,00	96,00
2.10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.601.582.000,00	1.458.856.627,00	142.725.373,00	91,09
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEN**	**4.399.023.972,00**	**4.120.858.522,00**	**278.165.450,00**	**93,68**
2.12	**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**4.399.023.972,00**	**4.120.858.522,00**	**278.165.450,00**	**93,68**
2.12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.318.181.472,00	3.074.766.134,00	243.415.338,00	92,66
2.12	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	705.148.700,00	704.955.070,00	193.630,00	99,97
2.12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	330.000.000,00	295.496.718,00	34.503.282,00	89,54
2.12	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	34.033.800,00	33.980.600,00	53.200,00	99,84
2.12	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	100,00
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**5.864.594.543,00**	**5.464.217.138,00**	**400.377.405,00**	**93,17**
2.15	**Dinas Perhubungan**	**5.864.594.543,00**	**5.464.217.138,00**	**400.377.405,00**	**93,17**
2.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.322.328.729,00	4.001.829.606,00	320.499.123,00	92,59
2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.542.265.814,00	1.462.387.532,00	79.878.282,00	94,82
2.15	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**6.379.556.910,00**	**6.090.477.296,00**	**289.079.614,00**	**95,47**
2.16	**Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian**	**6.379.556.910,00**	**6.090.477.296,00**	**289.079.614,00**	**95,47**
2.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.032.763.792,00	2.766.467.426,00	266.296.366,00	91,22
2.16	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.154.038.640,00	2.139.125.670,00	14.912.970,00	99,31
2.16	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.176.457.778,00	1.169.205.300,00	7.252.478,00	99,38
2.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	10.243.200,00	10.205.400,00	37.800,00	99,63
2.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	6.053.500,00	5.473.500,00	580.000,00	90,42
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENG**	**7.191.428.341,00**	**6.661.139.168,00**	**530.289.173,00**	**92,63**
2.17	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**7.191.428.341,00**	**6.661.139.168,00**	**530.289.173,00**	**92,63**
2.17	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.402.200,00	5.401.500,00	700,00	99,99
2.17	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	19.153.000,00	8.775.900,00	10.377.100,00	45,82

2.17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.448.174.841,00	5.945.246.292,00	502.928.549,00	92,20
2.17	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	53.884.400,00	41.091.300,00	12.793.100,00	76,26
2.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	14.656.900,00	11.113.200,00	3.543.700,00	75,82
2.17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	636.557.000,00	635.910.976,00	646.024,00	99,90
2.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**3.700.779.182,00**	**3.438.205.163,00**	**262.574.019,00**	**92,90**
2.18	**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**3.700.779.182,00**	**3.438.205.163,00**	**262.574.019,00**	**92,90**
2.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.012.468.182,00	2.756.613.823,00	255.854.359,00	91,51
2.18	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00
2.18	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	15.000.000,00	14.948.860,00	51.140,00	99,66
2.18	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	74.960.000,00	74.754.480,00	205.520,00	99,73
2.18	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	597.785.000,00	591.888.000,00	5.897.000,00	99,01
2.18	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**8.356.627.072,00**	**7.969.899.690,00**	**386.727.382,00**	**95,37**
2.19	**Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga**	**8.356.627.072,00**	**7.969.899.690,00**	**386.727.382,00**	**95,37**
2.19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.102.645.732,00	4.803.497.147,00	299.148.585,00	94,14
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	985.045.840,00	984.954.512,00	91.328,00	99,99
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	499.999.800,00	499.810.831,00	188.969,00	99,96
2.19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	398.935.700,00	317.137.200,00	81.798.500,00	79,50
2.19	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	600.000.000,00	594.500.000,00	5.500.000,00	99,08
2.19	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**5.051.750.122,00**	**4.792.129.606,00**	**259.620.516,00**	**94,86**
2.23	**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**	**5.051.750.122,00**	**4.792.129.606,00**	**259.620.516,00**	**94,86**
2.23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.970.543.122,00	2.743.422.706,00	227.120.416,00	92,35
2.23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.984.707.000,00	1.955.751.900,00	28.955.100,00	98,54

2.23	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	75.000.000,00	71.658.000,00	3.342.000,00	95,54
2.23	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
2.23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	5.000.000,00	4.797.000,00	203.000,00	95,94
2.23	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**16.550.054.530,00**	**14.082.358.056,00**	**2.467.696.474,00**	**85,09**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**6.783.803.450,00**	**5.706.154.800,00**	**1.077.648.650,00**	**84,11**
3.25	**Dinas Perikanan**	**6.783.803.450,00**	**5.706.154.800,00**	**1.077.648.650,00**	**84,11**
3.25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.780.892.350,00	4.387.980.055,00	392.912.295,00	91,78
3.25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.341.856.600,00	1.037.369.700,00	304.486.900,00	77,31
3.25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	345.294.700,00	87.705.745,00	257.588.955,00	25,40
3.25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	315.759.800,00	193.099.300,00	122.660.500,00	61,15
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**5.680.154.361,00**	**4.807.727.169,00**	**872.427.192,00**	**84,64**
3.27	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**5.680.154.361,00**	**4.807.727.169,00**	**872.427.192,00**	**84,64**
3.27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.667.184.361,00	3.320.165.205,00	347.019.156,00	90,54
3.27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.148.709.700,00	896.794.254,00	251.915.446,00	78,07
3.27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	282.280.300,00	120.578.250,00	161.702.050,00	42,72
3.27	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	561.980.000,00	450.380.160,00	111.599.840,00	80,14
3.27	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20.000.000,00	19.809.300,00	190.700,00	99,05
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**4.086.096.719,00**	**3.568.476.087,00**	**517.620.632,00**	**87,33**
3.31	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**4.086.096.719,00**	**3.568.476.087,00**	**517.620.632,00**	**87,33**
3.31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.792.849.119,00	3.456.863.887,00	335.985.232,00	91,14
3.31	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	59.400,00	59.400,00	0,00	100,00
3.31	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	154.823.200,00	25.658.000,00	129.165.200,00	16,57
3.31	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	104.960.000,00	64.117.000,00	40.843.000,00	61,09
3.31	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	12.322.000,00	6.845.800,00	5.476.200,00	55,56
3.31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.063.000,00	4.972.000,00	5.091.000,00	49,41

3.31	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	11.020.000,00	9.960.000,00	1.060.000,00	90,38
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**76.305.217.936,00**	**69.033.295.747,00**	**7.271.922.189,00**	**90,47**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**42.800.541.291,00**	**39.950.546.990,00**	**2.849.994.301,00**	**93,34**
4.01	**Sekretariat Daerah**	**42.800.541.291,00**	**39.950.546.990,00**	**2.849.994.301,00**	**93,34**
4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.761.154.891,00	27.976.654.897,00	1.784.499.994,00	94,00
4.01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.868.581.700,00	10.858.924.388,00	1.009.657.312,00	91,49
4.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.170.804.700,00	1.114.967.705,00	55.836.995,00	95,23
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**33.504.676.645,00**	**29.082.748.757,00**	**4.421.927.888,00**	**86,80**
4.02	**Sekretariat DPRD**	**33.504.676.645,00**	**29.082.748.757,00**	**4.421.927.888,00**	**86,80**
4.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.394.687.985,00	19.431.651.861,00	2.963.036.124,00	86,77
4.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.109.988.660,00	9.651.096.896,00	1.458.891.764,00	86,87
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**210.868.122.206,46**	**199.943.224.544,00**	**10.924.897.662,46**	**94,82**
5.01	**PERENCANAAN**	**6.342.627.951,00**	**5.529.521.759,00**	**813.106.192,00**	**87,18**
5.01	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**6.342.627.951,00**	**5.529.521.759,00**	**813.106.192,00**	**87,18**
5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.836.158.351,00	3.410.932.408,00	425.225.943,00	88,92
5.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.169.572.200,00	1.026.817.630,00	142.754.570,00	87,79
5.01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	286.898.100,00	284.986.605,00	1.911.495,00	99,33
5.01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.049.999.300,00	806.785.116,00	243.214.184,00	76,84
5.02	**KEUANGAN**	**199.156.525.160,46**	**189.457.979.591,00**	**9.698.545.569,46**	**95,13**
5.02	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**189.431.757.607,46**	**180.880.625.312,00**	**8.551.132.295,46**	**95,49**
5.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.231.154.967,46	14.825.484.318,00	3.405.670.649,46	81,32
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	169.869.236.840,00	164.845.477.928,00	5.023.758.912,00	97,04
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.331.365.800,00	1.209.663.066,00	121.702.734,00	90,86
5.02	**Badan Pendapatan Daerah**	**9.724.767.553,00**	**8.577.354.279,00**	**1.147.413.274,00**	**88,20**
5.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.151.596.353,00	6.332.314.519,00	819.281.834,00	88,54
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.573.171.200,00	2.245.039.760,00	328.131.440,00	87,25
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**5.368.969.095,00**	**4.955.723.194,00**	**413.245.901,00**	**92,30**

5.03	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**5.368.969.095,00**	**4.955.723.194,00**	**413.245.901,00**	**92,30**
5.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.403.234.295,00	4.022.821.493,00	380.412.802,00	91,36
5.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	965.734.800,00	932.901.701,00	32.833.099,00	96,60
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**11.981.269.009,00**	**11.251.600.939,00**	**729.668.070,00**	**93,91**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**11.981.269.009,00**	**11.251.600.939,00**	**729.668.070,00**	**93,91**
6.01	**Inspektorat**	**11.981.269.009,00**	**11.251.600.939,00**	**729.668.070,00**	**93,91**
6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.979.049.209,00	8.333.991.839,00	645.057.370,00	92,82
6.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.523.839.800,00	2.448.769.100,00	75.070.700,00	97,03
6.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	478.380.000,00	468.840.000,00	9.540.000,00	98,01
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**39.732.444.365,00**	**36.991.163.544,00**	**2.741.280.821,00**	**93,10**
7.01	**KECAMATAN**	**39.732.444.365,00**	**36.991.163.544,00**	**2.741.280.821,00**	**93,10**
7.01	**Kecamatan Pattallassang**	**9.584.830.024,00**	**9.049.096.804,00**	**535.733.220,00**	**94,41**
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.987.817.406,00	7.452.128.529,00	535.688.877,00	93,29
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.592.962.618,00	1.592.918.275,00	44.343,00	100,00
7.01	**Kecamatan Polongbangkeng Utara**	**8.155.732.542,00**	**7.638.372.975,00**	**517.359.567,00**	**93,66**
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.868.502.542,00	6.351.622.975,00	516.879.567,00	92,47
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.380.000,00	3.300.000,00	80.000,00	97,63
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.283.850.000,00	1.283.450.000,00	400.000,00	99,97
7.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	**Kecamatan Polongbangkeng Selatan**	**6.915.793.357,00**	**6.575.073.073,00**	**340.720.284,00**	**95,07**
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.586.330.759,00	5.246.218.275,00	340.112.484,00	93,91
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.305.112.598,00	1.304.543.348,00	569.250,00	99,96
7.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.500.000,00	7.499.650,00	350,00	100,00
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.850.000,00	6.811.800,00	38.200,00	99,44
7.01	**Kecamatan Mangarabombang**	**3.462.956.386,00**	**3.112.640.467,00**	**350.315.919,00**	**89,88**

7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.288.474.256,00	2.938.208.337,00	350.265.919,00	89,35
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.621.200,00	8.571.200,00	50.000,00	99,42
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	165.860.930,00	165.860.930,00	0,00	100,00
7.01	**Kecamatan Mappakasunggu**	**2.376.475.130,00**	**2.211.444.527,00**	**165.030.603,00**	**93,06**
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.050.720.930,00	1.888.554.227,00	162.166.703,00	92,09
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.725.000,00	4.500.000,00	225.000,00	95,24
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	303.029.200,00	300.590.300,00	2.438.900,00	99,20
7.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.000.000,00	17.800.000,00	200.000,00	98,89
7.01	**Kecamatan Sanrobone**	**1.314.702.497,00**	**1.217.118.184,00**	**97.584.313,00**	**92,58**
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.297.927.497,00	1.200.358.184,00	97.569.313,00	92,48
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.765.000,00	14.760.000,00	5.000,00	99,97
7.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.010.000,00	2.000.000,00	10.000,00	99,50
7.01	**Kecamatan Galesong**	**1.786.066.526,00**	**1.656.338.186,00**	**129.728.340,00**	**92,74**
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.770.345.226,00	1.640.616.886,00	129.728.340,00	92,67
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.579.300,00	2.579.300,00	0,00	100,00
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.436.400,00	10.436.400,00	0,00	100,00
7.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	100,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	951.600,00	951.600,00	0,00	100,00
7.01	**Kecamatan Galesong Utara**	**3.202.162.907,00**	**2.985.286.737,00**	**216.876.170,00**	**93,23**
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.875.728.107,00	2.659.096.937,00	216.631.170,00	92,47
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.334.600,00	1.331.800,00	2.800,00	99,79
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	321.100.200,00	320.858.000,00	242.200,00	99,92
7.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
7.01	**Kecamatan Kepulauan Tanakeke**	**1.300.649.221,00**	**1.139.264.654,00**	**161.384.567,00**	**87,59**

7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.283.395.021,00	1.123.979.254,00	159.415.767,00	87,58
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.061.000,00	13.790.400,00	270.600,00	98,08
7.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000,00	1.495.000,00	1.005.000,00	59,80
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	693.200,00	0,00	693.200,00	0,00
7.01	**Kecamatan Galesong Selatan**	**1.633.075.775,00**	**1.406.527.937,00**	**226.547.838,00**	**86,13**
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.618.950.325,00	1.392.643.562,00	226.306.763,00	86,02
7.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.089.750,00	2.952.100,00	137.650,00	95,54
7.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.615.800,00	7.534.650,00	81.150,00	98,93
7.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	722.500,00	710.225,00	12.275,00	98,30
7.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.697.400,00	2.687.400,00	10.000,00	99,63
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**28.327.409.294,00**	**27.927.158.154,00**	**400.251.140,00**	**98,59**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**28.327.409.294,00**	**27.927.158.154,00**	**400.251.140,00**	**98,59**
8.01	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**	**28.327.409.294,00**	**27.927.158.154,00**	**400.251.140,00**	**98,59**
8.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.997.178.194,00	2.715.639.914,00	281.538.280,00	90,61
8.01	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	609.617.700,00	583.886.590,00	25.731.110,00	95,78
8.01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	23.715.924.000,00	23.715.352.650,00	571.350,00	100,00
8.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	736.400,00	0,00	736.400,00	0,00
8.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00
8.01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.002.093.000,00	912.279.000,00	89.814.000,00	91,04

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan skala peringkat nilai setiap indikator sasaran, perbandingan capaian sasaran Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

NO	KRITERIA	CAPAIAN THN 2023	CAPAIAN THN 2024
1	Sangat Tinggi	10	10
2	Tinggi	0	2
3	Sedang	2	1
4	Rendah	1	0
5	Sangat Rendah	1	1
6	Tidak ada nilai	0	0
Jumlah Indikator		14	14

Capaian kinerja yang mencapai hasil yang diharapkan merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Takalar. Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai dapat memacu semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai realisasi yang diharapkan. Terkait dengan indikator kinerja yang belum tercapai, maka strategi di masa mendatang yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja OPD tahun berjalan untuk memantapkan tahapan realisasi kinerja;
2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala baik itu triwulan, semesteran dan tahunan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja OPD secara berkala dan berkelanjutan;
4. Mengefektifkan dan mengefesiensikan penggunaan anggaran dengan membuat program-program yang prioritas dan menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
5. Melakukan revisi RPD dan renstra OPD agar setiap program dari visi misi yang akan dicapai

dapat terukur dan selaras satu sama lain.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Takalar ini dibuat sebagai penggambaran capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Takalar. Semoga Laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang sehingga pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	**Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg**
Jabatan	:	Pj. BUPATI TAKALAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Takalar, 22 Januari 2024
Pj. BUPATI TAKALAR

Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,453
		2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,70
2	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	1	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	29,178
3	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-sektor Perekonomian Daerah	1	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,07
		2	Rasio Gini	Angka	0,35
		3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04-6,52
4	Berkurangnya Penduduk Miskin	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,96
		2	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persen	6,90%
5	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,06
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (73-75)
		2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (>60-70)
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	70 - 80
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik
8	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban	1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	89,41

Pj. BUPATI TAKALAR

Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg

PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	611.014.203.444
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.949.162.360
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	649.240.500
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	152.743.000
9	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	276.730.700
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	437.921.500
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	461.439.800
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	193.022.206.461
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.535.712.500
14	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	50.000.000
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	481.502.900
16	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.620.379.000
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.179.995.200
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.143.100.100
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	164.000.000
21	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	25.703.932.715
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	34.447.835.000
23	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	17.640.000
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	367.990.000
25	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	210.000.000
26	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	249.980.000
27	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.635.015.700
28	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	806.839.000
29	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.674.435.150
30	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	520.000.000
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.000.000
32	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	204.802.400
33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.197.600

NO	PROGRAM	ANGGARAN
34	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	101.000.000
35	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.000.000
36	PROGRAM PENATAAN DESA	2.000.000
37	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.000.000
38	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	768.200.000
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	9.999.900
40	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	406.000.000
41	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	138.012.600
42	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.056.368.300
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.761.600.000
44	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	87.497.500
45	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0
46	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.016.623.700
47	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.357.660.800
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.000.000
49	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	519.909.400
50	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	999.900
51	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.500.000.000
52	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20.624.000
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	75.908.000
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	118.987.400
55	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	999.000
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.040.000
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.608.821.300
58	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	726.434.000
59	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	30.000.000
60	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	115.000.000
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	12.000.000
62	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	812.944.500
63	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN
34	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	101.000.000
35	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.000.000
36	PROGRAM PENATAAN DESA	2.000.000
37	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.000.000
38	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	768.200.000
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	9.999.900
40	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	406.000.000
41	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	138.012.600
42	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.056.368.300
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.761.600.000
44	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	87.497.500
45	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0
46	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.016.623.700
47	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.357.660.800
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.000.000
49	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	519.909.400
50	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	999.900
51	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.500.000.000
52	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20.624.000
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	75.908.000
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	118.987.400
55	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	999.000
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.040.000
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.608.821.300
58	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	726.434.000
59	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	30.000.000
60	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	115.000.000
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	12.000.000
62	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	812.944.500
63	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0

NO	PROGRAM	ANGGARAN
93	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	219.999.877
94	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.086.979.800
95	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.091.784.000
96	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	561.980.000
97	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20.000.000
98	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	59.400
99	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	230.000.000
100	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100.000.000
101	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000
102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.063.000
103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	40.000.000
104	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.304.356.700
105	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	820.000.000
106	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.804.461.420
107	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.150.900.000
108	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	479.388.500
109	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.025.118.900
110	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	176.876.189.409
111	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.217.365.800
112	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.024.551.800
113	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	606.224.000
114	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.140.537.800
115	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	877.800.000
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.050.000
117	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.082.365.348
118	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.471.600
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.420.000
120	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.377.400

NO	PROGRAM	ANGGARAN
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.621.200
124	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0
125	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.725.000
126	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.425.000
127	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000
128	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.450.000
129	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	615.621.600
130	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	23.764.869.000
131	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	7.556.400
132	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	13.020.000
133	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	670.190.300
JUMLAH		**1.289.565.280.374**

2. Kunci Data Statistik

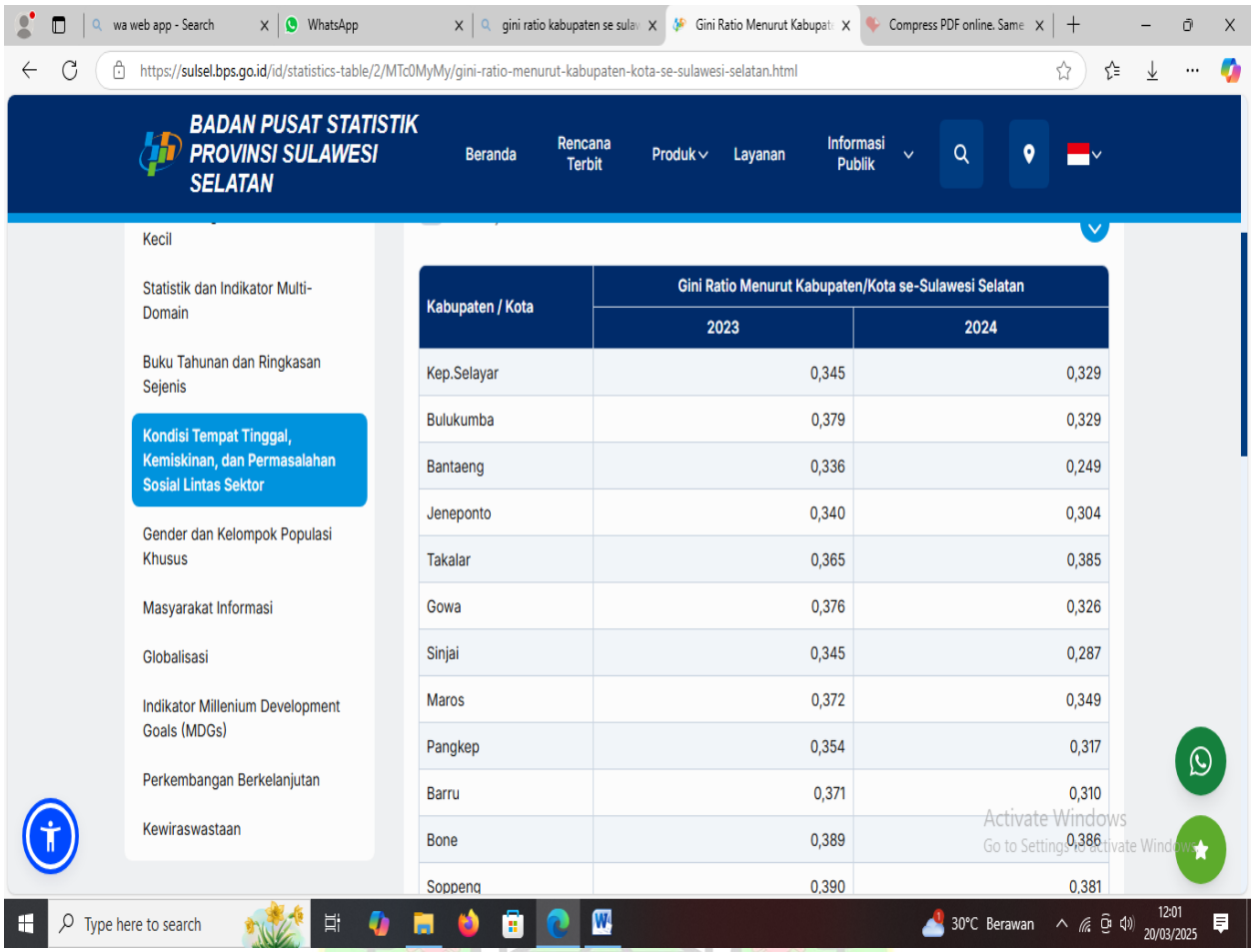
Statistik Kunci, 2022–2024
Key Statistics, 2022–2024

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/*SOCIAL*				
Penduduk[1]/*Population*[1]	ribu/*thousand*	308.53	312.81	317.02
Laju Pertumbuhan Penduduk[1]/*Population Growth*[1]	%	1,43	1,39	1,35
Angka Harapan Hidup[1]-e_0/*Life Expectancy Rate*[1]	tahun/*years*	73,16	73,43	73,69
Angka Melek Huruf Usia 15+/*Literacy Rate Aged 15+*	%	88,20	89,74	89,62
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK[2] *Labour Force Participation Rate-LFPR*[2]	%	64,46	65,86	64,43
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT[2] *Unemployment Rate-UR*[2]	%	2,63	3,58	3,84
Penduduk Miskin[3]/*Poor People*[3]	ribu/*thousand*	24,75	25,01	23,51
Persentase Penduduk Miskin[3] *Percentage of Poor People*[3]	%	8,25	8,29	7,75
Indeks Pembangunan Manusia-IPM[4] *Human Development Index*[4]	–	70,86	71,46	72,06
EKONOMI/*ECONOMIC*				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku[5] *Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price*[5]	miliar rupiah *billion rupiahs*	12.257,05	12.868,38	13.428,09
Laju Pertumbuhan Ekonomi[6]/*Economic Growth*[6]	%	4,64	3,86	4,34
PDRB Per Kapita Harga Berlaku *Per Capita of GRDP at Current Price*	juta rupiah *million rupiahs*	39,73	41,14	42,36

https://skalarkab.bps.go.id

Catatan/Notes:
1. Data 2022 merupakan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of Interim Population Projection 2020-2023 (mid year/June)
   Data 2023-2024 merupakan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)/ *2023 data is the result of the 2020-2050 Indonesian Population Projection Results of the 2020 Population Census (Mid year/June)*
2. Kondisi Agustus/*Condition at August*
3. Kondisi Maret/*Condition at March*
4. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/*Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita*
5. Mulai tahun 2010 mengadopsi *System of National Account* 2008 (SNA 2008)/*Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008)*
6. Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/*Using 2010 base year (2010=100)*

3. Gini Ratio Kabupaten Takalar



Kabupaten / Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan	
	2023	2024
Kep.Selayar	0,345	0,329
Bulukumba	0,379	0,329
Bantaeng	0,336	0,249
Jeneponto	0,340	0,304
Takalar	0,365	0,385
Gowa	0,376	0,326
Sinjai	0,345	0,287
Maros	0,372	0,349
Pangkep	0,354	0,317
Barru	0,371	0,310
Bone	0,389	0,386
Soppeng	0,390	0,381

4. Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024

PROVINSI SULAWESI SELATAN



3,61
SKOR IDSD 2024
PROVINSI
SULAWESI SELATAN



4
kab/kota
≥ skor provinsi

NAMA KABIKOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. SULAWESI SELATAN	4,07	3,52	3,56	4,33	3,86	4,13	2,41	2,66	2,80	4,71	3,56	3,68	3,61
RATA-RATA KABIKOTA	4,32	3,32	4,32	3,65	3,77	4,03	3,15	2,95	1,98	4,11	3,63	2,14	3,45
KEPULAUAN SELAYAR	4,03	3,30	4,21	4,02	3,67	4,18	2,37	2,69	1,72	3,70	3,45	1,80	3,26
KAB. BULUKUMBA	4,04	3,61	4,40	3,81	3,66	4,27	3,24	3,23	1,89	4,09	3,12	2,31	3,47
BANTAENG	3,97	3,55	4,44	3,23	3,85	3,78	2,96	3,20	2,35	3,98	3,14	1,97	3,37
JENEPONTO	4,10	3,66	4,43	3,70	3,50	3,74	3,23	2,37	2,07	3,97	4,41	1,50	3,39
TAKALAR	4,27	3,72	4,53	3,27	3,58	3,87	2,72	2,85	2,34	3,98	3,81	1,83	3,40
GOWA	4,29	3,70	4,42	3,54	3,83	4,06	3,71	3,27	2,25	4,33	4,13	2,30	3,65
SINJAI	4,53	3,75	4,32	3,88	3,58	4,18	2,81	3,24	1,38	4,03	3,94	2,40	3,50
MAROS	4,61	3,89	4,54	2,71	3,71	4,06	4,06	3,07	2,34	4,26	4,02	1,84	3,59
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	4,63	4,12	4,60	3,39	3,53	3,94	1,50	2,97	1,34	4,40	3,76	2,65	3,40
BARRU	4,53	3,99	4,19	4,02	3,72	4,06	3,00	2,63	1,92	3,84	3,55	1,61	3,42
BONE	4,46	3,75	4,27	3,80	3,58	3,96	2,33	2,53	1,12	4,52	3,34	2,60	3,35
SOPPENG	4,62	3,25	4,23	3,70	3,80	3,99	3,19	2,87	1,51	4,02	3,72	2,02	3,41
WAJO	4,60	3,03	4,63	3,14	3,60	4,07	3,09	2,39	1,50	4,26	2,97	2,23	3,29
SIDENRENG RAPPANG	4,14	3,28	4,21	3,72	3,82	4,18	2,62	2,85	1,51	4,09	2,87	2,18	3,29
PINRANG	4,14	3,35	4,48	3,51	3,79	3,92	2,82	4,00	1,51	4,27	3,60	1,74	3,43
ENREKANG	4,50	3,26	4,14	3,36	3,87	4,53	2,31	2,36	1,53	3,81	4,04	2,01	3,31
LUWU	4,51	2,63	3,99	3,93	3,84	4,03	2,46	2,47	1,67	4,17	3,44	1,56	3,23
TANA TORAJA	4,01	2,68	3,87	3,63	4,09	4,05	4,31	2,80	2,52	3,81	3,57	2,94	3,52
LUWU UTARA	4,55	2,76	3,31	3,82	3,70	3,97	2,33	2,54	1,62	4,07	3,52	0,86	3,09
LUWU TIMUR	4,47	2,55	3,81	3,14	3,85	3,85	1,13	2,73	1,45	4,36	3,56	1,22	3,01
TORAJA UTARA	4,53	2,58	4,07	3,78	4,08	4,07	4,65	2,03	1,78	3,87	2,98	1,70	3,34
MAKASSAR	3,98	3,26	4,89	4,70	3,97	3,70	4,84	4,47	2,95	5,00	3,30	4,14	4,10
PAREPARE	4,20	2,85	4,89	3,86	3,90	4,21	5,00	4,22	4,29	3,85	4,98	2,88	4,09
PALOPO	4,03	3,18	4,77	3,96	3,87	4,06	4,91	2,98	3,06	3,90	3,86	3,18	3,81

5. LHE AKIP Kab. Takalar Tahun 2024

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/466/AA.05/2024 3 September 2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar**
di
Pattallassang

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Takalar, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Takalar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Penyelarasan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah baik Renstra, PK, dan IKU;

b. Pendampingan penyusunan pohon kinerja serta Indikator Kinerja Utama pada perangkat daerah;

c. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;

d. Hasil penilaian SAKIP telah dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian TPP tahun 2023 dan 2024.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar menunjukkan nilai **64,05** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,59	21,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,30	18,59
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,33	10,40
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,15	13,26
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**63,37**	**64,05**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Takalar telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPD yang telah dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya pada tingkat Perangkat Daerah dan

unit kerja di bawahnya dengan kualitas yang baik.

Penyusunan dokumen tersebut dilakukan berdasarkan hasil penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya:

a. Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis dan beserta indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi *outcome* atau belum sesuai level kinerja Kepala Dinas. Contohnya pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan;
b. Beberapa Indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria SMART (spesifik, terukur/*measurable, achievable, relevant, time* bound) dan cukup. Contohnya pada Dinas Sosial pada sasaran "Meningkatnya penanganan PMKS" dengan indikator "Persentase kepatuhan SPM bidang sosial" dan "Persentase penyaluran bantuan pangan non tunai/KUBE";
c. Penjenjangan/*cascading* kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor (CSF)* atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Contohnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Perikanan.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Takalar dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut Pemerintah Kabupaten Takalar telah memanfaatkan dan menggunakan aplikasi EWAKI (Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Pemerintah Takalar) sebagai sarana monitoring dan evaluasi pimpinan organisasi setiap triwulanan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya:

a. Pemerintah Kabupaten Takalar telah menyusun dokumen IKU, namun pada sebagian perangkat daerah IKU belum memuat definisi operasional dan atau formulasi perhitungan serta sumber data sehingga beberapa indikator belum diyakini ketepatan pengukurannya maupun keandalan datanya. Contoh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan;

b. Pemanfaatan aplikasi EWAKI belum sepenuhnya mendukung implementasi manajemen kinerja organisasi. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan dari masing-masing perangkat daerah untuk meng*update* kinerja secara berkala dan belum adanya *feedback* dari pimpinan terkait capaian kinerja yang dilaporkan.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Takalar telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023, baik tingkat pemda maupun tingkat organisasi perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan sudah dipublikasi secara umum melalui website pemda. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:

a. Laporan kinerja di level perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai seperti membandingkan realisasi kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut tampak dari target kinerja tahun berjalan yang nilainya lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contoh pada sebagian besar indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah atau PK Bupati 2024.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Takalar telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP di seluruh organisasi perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi internal tersebut telah disusun pedoman evaluasi yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya:

a. Hasil evaluasi internal belum memuat catatan terkait aspek kualitas dokumen perencanaan maupun pengukuran dan belum memberikan rekomendasi yang cukup serta menyasar langsung akar permasalahan yang dialami oleh sebagian besar perangkat daerah dalam

mengimplementasikan SAKIP, contoh pada Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;

b. Belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang baku untuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat sehingga perbaikan kualitas implementasi AKIP belum dapat dipastikan merata dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Melakukan reviu dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan bahwa seluruh isu strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dapat terkawal dan memastikan kesesuaian level kinerjanya dengan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih berorientasi *outcome;*
2) Mereviu kembali indikator kinerja pada seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut;
3) Memastikan kembali penjenjangan kinerja yang dimiliki telah mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/*logical framework* dan mengutamakan *critical success factor (CSF)* sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja;
4) Melakukan reviu dan memastikan bahwa dokumen Indikator Kinerja Utama seluruh perangkat daerah telah memuat definisi operasional, rumusan perhitungan, sumber data serta dapat dipastikan keandalan data dari masing-masing indikator yang ditetapkan;
5) Mendorong kepatuhan perangkat daerah dalam pemanfaatan aplikasi EWAKI dengan meng*update* data kinerja secara berkala sehingga EWAKI dapat dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai dasar dalam memberikan *feedback* untuk peningkatan kinerja organisasi;
6) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang simpulan capaian seluruh sasaran kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan

sumber daya;

7) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan khususnya target kinerja yang ditetapkan dapat lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
8) Memastikan agar temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggambarkan hal-hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap perangkat daerah;
9) Menyusun mekanisme yang jelas atas pelaksanaan monitoring rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal, dan selanjutnya memanfaatkannya sebagai dasar dalam pemantauan progres tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah;

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

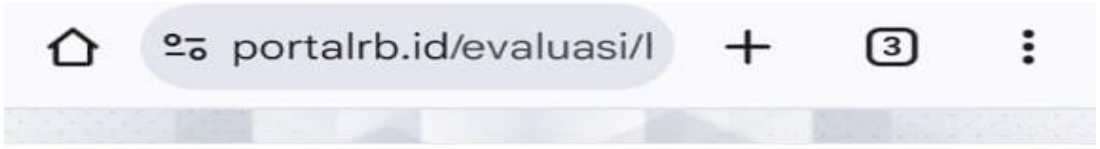
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Pj. Bupati Takalar.

6. Indeks RB Kabupaten Takalar Tahun 2024



Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

RB General Awal	59.69
Koefisien	0
RB General	59.69
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	59.69
RB Tematik	8.57
Index RB	68.26
File Berkas	

7. Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Takalar

Provinsi Sulawesi Selatan

2024

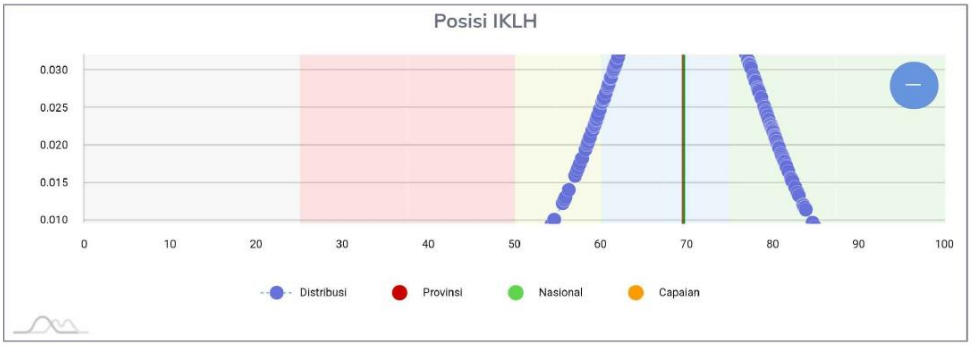
Kepala Daerah : Pj. Bupati - Setiawan Aswad
Luas Wilayah : - Km^2
Populasi : - Jiwa

Kepala DPRD : Darwis Sijaya
Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL
Pendapatan Per Kapita : -

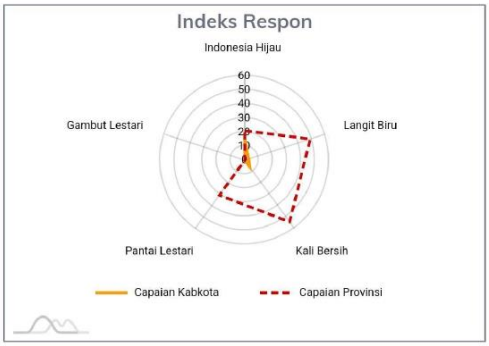
IKLH
67.21
SEDANG

Indeks Respon
6.39

Peringkat
Nasional : 277 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 17 dari 24 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	4	8	8
AIR	2	6	6
LAHAN	0	1	1
TOTAL	6	15	15





8. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten TakalarTahun 2024

Tabel 3.91. IKM, Nilai mutu dan Kinerja Unit Rata-rata nilai kepuasan Unit Kerja Pemda Kab.Takalar

NO.	NAMA DINAS/INSTANSI	Nilai IKM	Total Nilai Unsur	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.80	95.09	A	Sangat Baik
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.58	89.54	A	Sangat Baik
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.26	81.39	B	Baik
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	3.60	90.00	A	Sangat Baik
5.	Badan Pendapatan Daerah	3.13	78.24	B	Baik
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.75	93.80	A	Sangat Baik
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.58	89.54	A	Sangat Baik
8.	Dinas Kesehatan	3.36	84.07	B	Baik
9.	Dinas Komunikasi dan Informasi	3.33	83.33	B	Baik
10.	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.36	83.98	B	Baik
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.27	81.67	B	Baik
12.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.18	79.44	B	Baik
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.27	81.85	B	Baik
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.48	87.04	B	Baik
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.48	87.04	B	Baik
16.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan dan Permukiman	3.16	79.07	B	Baik
17.	Dinas Perikanan	3.69	92.13	A	Sangat Baik
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.43	85.65	B	Baik
19.	Dinas Perhubungan	3.50	87.41	B	Baik
20.	RSUD H.Padjonga Dg.Ngalle	3.70	92.48	A	Sangat Baik

21.	Sekretariat DPRD	3.40	85.00	B	Baik
22.	Sekretariat Daerah	3.37	84.35	B	Baik
23.	Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.15	78.80	B	Baik
24.	Inspektorat Daerah	3.16	78.89	B	Baik
25.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	3.33	83.15	B	Baik
26.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.46	86.39	B	Baik
27.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.40	85.00	B	Baik
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.77	94.35	A	Sangat Baik
29.	Kecamatan Pattalassang	3.55	88.80	A	Sangat Baik
30.	Kec. Polongbangkeng Selatan	3.66	91.48	A	Sangat Baik
31.	Kec. Polongbangkeng Utara	3.68	91.94	A	Sangat Baik
32.	Kecamatan Mangarabombang	3.30	82.59	B	Baik
33.	Kecamatan Mappakasunggu	3.43	85.74	B	Baik
34.	Kecamatan Sanrobone	3.48	87.04	B	Baik
35.	Kecamatan Galesong	3.36	84.07	B	Baik
36.	Kecamatan Galesong Selatan	3.37	84.26	B	Baik
37.	Kecamatan Galesong Utara	3.35	83.80	B	Baik
38.	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	3.20	80.09	B	Baik
39.	Puskesmas Aengtowa	3.29	82.27	B	Baik
40.	Puskesmas Galesong Utara	3.35	83.80	B	Baik
41.	Puskesmas Galesong	3.62	90.51	A	Sangat Baik
42.	Puskesmas Bontomangape	3.63	90.65	A	Sangat Baik
43.	Puskesmas Bontokassi	3.59	89.81	A	Sangat Baik
44.	Puskesmas Bontomarannu	3.30	82.41	B	Baik
45.	Puskesmas Sanrobone	3.17	79.35	B	Baik
46.	Puskesmas Mappakasunggu	3.47	86.85	B	Baik

47.	Puskesmas Pattalassang	3.66	91.39	A	Sangat Baik
48.	Puskesmas Mangarabombang	3.40	85.09	B	Baik
49.	Puskesmas Pattopakang	3.46	86.39	B	Baik
50.	Puskesmas Polongbangkeng Selatan	3.56	88.89	A	Sangat Baik
51.	Puskesmas Bulukunyi	3.59	89.72	A	Sangat Baik
52.	Puskesmas Polongbangkeng Utara	3.53	88.33	A	Sangat Baik
53.	Puskesmas Ko'mara	3.72	93.06	A	Sangat Baik
54.	Puskesmas Towata	3.73	93.33	A	Sangat Baik
55.	Puskesmas Tanakeke	3.33	83.21	B	Baik
NILAI RATA-RATA IKM PEMDA KAB.TAKALAR TAHUN 2024		**3.45**	**86.24**	**B**	**Baik**